

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

SUCI KARTIKA

NPM : C10140055



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2019

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

SUCI KARTIKA

NPM : C10140055

Bandung, 31 Juli 2019

Pembimbing :

Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi S1
Akuntansi

Dr. rer. nat. M. Fani Cahyadito, SE., M.Sc., CSP

Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 31 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

(Suci Kartika)

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Ditulis oleh :
Suci Kartika**

**Pembimbing :
Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak., CA**

ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan diharapkan dapat memenuhi karakteristik kualitas untuk mencapai tujuan. Kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Tiga variabel yang diteliti kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah sebagai variabel independen serta kualitas informasi akuntansi sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Data yang digunakan berasal dari data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan barang milik daerah, kualitas laporan keuangan

**THE EFFECT OF THE COMPETENCE OF HUMAN RESOURCE AND
MANAGEMENT OF REGIONAL GOVERNMENT ASSETS ON THE
QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE REGIONAL
GOVERNMENT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Written by :
Suci Kartika**

**Preceptor :
Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak., CA**

ABSTRACT

Quality of financial statements produced by the company is expected to meet the quality characteristics to achieve the goals. The competence of human resource and management of regional government assets are factors that determine the quality of financial statement of the regional government. The purpose of this research is to explain the influence of the competence of human resource and management of regional government assets on the quality of the financial statements of the regional government. Three variables are competence of human resource and management of regional government assets as independent variables and the quality of the financial statements of the regional government as the dependent variable. This research in the Region Work Unit Bandung Barat Local Government.

This research uses quantitative method with descriptive verification approach. The data used comes from the primary data. The sampling technique used purposive sampling.

Based on the results of hypothesis testing, it can be concluded that the partially competence of human resource has a positive not significant effect on the quality of financial statements, and management of regional government assets has a positive significant effect on the quality of financial statement. In addition, simultaneously it can be concluded that there is a influence of competence of human resource, and management of regional government assets on the quality of of financial statement.

Keywords: *competence of human resource, management of regional government assets, the quality of of financial statement*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena dengan segala rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusiadan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian sarjana ekonomi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, baik dari isi materi maupun dalam penulisan bahasa. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan masukan, sehingga penulis yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi.

Skripsi ini adalah karya yang tak lepas dari banyaknya dukungan dan masukan dari pihak akademisi dan praktisi. Karena banyaknya dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu tercapainya hasil penelitian ini, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi penelitian ini :

1. Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.
2. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.
3. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.
4. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS.
5. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
6. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
7. Faiz Said Bachmid., S.E., M.Ak., Ak selaku dosen wali yang telah membimbing selama masa perkuliahan dan memberi motivasi yang sangat berharga kepada para mahasiswanya.
8. Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran, penghargaan serta nasehat yang membangun kepada penulisselama penyusunan skripsi ini.
9. Papah dan Mamahku tercinta, Pa Otong dan Bu Partini terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang tulus serta dukungan penuh pada saat kegiatan penelitian dan tiada henti memberikan dukungan moril & materil, serta doa yang terbaik untukku, serta Nida Amanda sebagai adik tercinta, dan seluruh keluarga besar penulis.

10. Keluarga besar S1 Akuntansi angkatan 2014 dan angkatan 2015.
11. Seluruh teman-teman satu kelas Akuntansi-2, terima kasih atas kekompakannya, suka dan duka bersama, serta rasa berjuang bersama sejak masa Spekta hingga semua sudah lulus dan sukses dengan kehidupan kita masing-masing.
12. Ira Mustika, Eri Karwati, Rita Amelia, Tita Ula, Ade Agustina, Adinda M.C.A., Iah Latipah, Jessica, dan Teh Aih sebagai sahabat yang selalu memberikan dorongan secara moril.
13. Tania Putri, Erni Erdiyanti, Casinah, Inayatu, dan Luvi Dwi yang telah memberikan banyak informasi dan referensi penelitian sebelumnya.
14. Teman-teman yang seimbang, baik yang periode semester ganjil maupun genap, yang saling memberi informasi dan dukungan.
15. Dwi Lestari, Ucu Astrianti, Mega Damayanti, Teh Disty, dan Gebby teman seperjuangan diakhir masa perkuliahan yang saling menguatkan dan selalu memberi semangat.
16. Lidya Wati Sinaga, Anna Tiara, Ficktriyani Yulianti, Muhammad Rahmat Sidik, Puji Ramadhan, Bangkit Septian dan Agung Permana, beserta teman-teman satu grup CSM yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Yang sudah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
17. Teman-teman satu komunitas IM3 dan komunitas satu barisan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan doa dan moril yang telah diberikan.

18. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dalam laporan ini telah banyak memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis. Semoga amal dan kebaikan mendapat balasan yang setimpal.

Harapan saya semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi orang banyak khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca. Penulis sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyusunan karya tulis ini terdapat kekeliruan yang tidak sengaja, serta tidak lupa penulis harapkan saran dan kritik dari pembaca yang membangun bagi kebaikan kesempurnaan skripsi ini.

Bandung, 31 Juli 2019

Penulis

Suci Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	xix
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian.....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	8
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2. Waktu Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	9
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia	9
2.1.1.1. Definisi Kompetensi.....	9
2.1.1.2. Pengertian Sumber Daya Manusia	11
2.1.1.3. Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	12
2.1.1.4. Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi	13
2.1.1.5. Karakteristik Kompetensi.....	14
2.1.2. Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	16
2.1.2.1. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	16
2.1.2.2. Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	17
2.1.2.3. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	17
2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan.....	21
2.1.3.1. Pengertian Kualitas.....	21
2.1.3.2. Pengertian Laporan Keuangan	21
2.1.3.3. Komponen Laporan Keuangan Daerah	21
2.1.3.4. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	27
2.1.3.5. Karakteristik Laporan Keuangan Daerah	27
2.1.3.6. Tujuan Laporan Keuangan	30

2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35
2.3.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	35
2.3.2. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36
2.4. Hipotesis Penelitian	39
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	40
3.1. Objek Penelitian.....	40
3.2. Metodologi Penelitian.....	40
3.2.1. Metode yang Digunakan	40
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	43
3.3. Populasi dan Teknik Sampel.....	46
3.3.1. Populasi Penelitian.....	46
3.3.2. Sampel	48
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	51
3.4.1. Sumber Data	51
3.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5. Teknik Analisis Data.....	54
3.5.1. Uji Validitas	54
3.5.2. Uji Reliabilitas	55
3.5.3. <i>Method of Successive Interval (MSI)</i>	56

3.5.4. Uji Asumsi Klasik.....	58
3.5.4.1. Uji Normalitas	58
3.5.4.2. Uji Multikolinieritas	59
3.5.4.3. Uji Heteroskedastisitas	60
3.5.5. Uji Regresi Linier Berganda	62
3.5.6. Analisis Koefisien Korelasi Berganda.....	63
3.5.7. Analisis Koefisien Determinasi	64
3.5.8. Pengujian Hipotesis	65
3.5.8.1. Uji Statistika t (Uji Parsial)	66
3.5.8.2. Uji Statistika F (Uji Simultan).....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	71
4.1. Hasil Penelitian	71
4.1.1. Karakteristik responden	71
4.1.2. Gambaran Variabel Penelitian	79
4.1.2.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	79
4.1.2.2. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	82
4.1.2.3. Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	85
4.2 Hasil Pengujian	88

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas.....	88
4.2.2. Hasil Pengujian Reliabilitas.....	91
4.2.3. Uji Asumsi Klasik	93
4.2.3.1. Uji Normalitas	93
4.2.3.2. Uji Multikolineritas	96
4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas	97
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda	99
4.2.5. Analisis Koefisien Korelasi	101
4.2.6. Analisis Koefisien Determinasi	103
4.2.7. Pengujian Hipotesis	104
4.2.7.1. Pengujian Pengaruh secara Parsial (Uji t)	104
4.2.7.2. Pengujian Pengaruh secara Simultan (Uji F)	106
4.3 Pembahasan	108
4.3.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	108
4.3.2. Pengelolaan Barang Mili, Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	109
4.3.3. Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	111
4.3.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja	

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	113
4.3.5. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	114
4.3.6. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1. Kesimpulan.....	118
5.2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu Mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	31
Tabel 3.1	Operasional Variabel	43
Tabel 3.2	Populasi Penelitian.....	47
Tabel 3.3	Sampel Penelitian	33
Tabel 3.4	Pemberian Bobot Nilai (Skor) Skala <i>Likert</i>	53
Tabel 3.5	Kriteria Interpretasi Skor Tanggapan Responden	53
Tabel 3.6	Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi.....	63
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota	71
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	74
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .	75
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	77
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	78
Tabel 4.7	Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden	79
Tabel 4.8	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia	80
Tabel 4.9	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	82

Tabel 4.10	Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	85
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	89
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah	89
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan	90
Tabel 4.14	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	91
Tabel 4.15	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah	92
Tabel 4.16	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan .	92
Tabel 4.17	Uji Normalitas <i>One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test</i>	96
Tabel 4.18	Uji Multikolinearitas	97
Tabel 4.19	Estimasi Regresi Linear Berganda Antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	100
Tabel 4.20	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	102
Tabel 4.21	Koefisien Korelasi	102
Tabel 4.22	Koefisien Determinasi	103
Tabel 4.23	<i>Coefficient</i> Uji T Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	104
Tabel 4.24	Hasil Uji F.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	38
Gambar 4.1 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	74
Gambar 4.2 Diagram Responden Berdasarkan Usia	75
Gambar 4.3 Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	76
Gambar 4.4 Diagram Responden Berdasarkan Latar Belakang	77
Gambar 4.5 Diagram Responden Berdasarkan Lama Bekerja	78
Gambar 4.6 Garis Kontinum Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	81
Gambar 4.7 Garis Kontinum Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	84
Gambar 4.8 Garis Kontinum Variabel Kualitas Laporan Keuangan	87
Gambar 4.9 Garis Norma – Plot	94
Gambar 4.10 Histogram Uji Normalitas.....	95
Gambar 4.11 Scatter Plot Uji Heteroskreditas.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Data Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 3 Tabulasi *Interval Succesive Method*
- Lampiran 4 Hasil *Output* SPSS
- Lampiran 5 Formulir Pengajuan Penulisan Judul Skripsi
- Lampiran 6 Fotokopi Surat Keputusan (SK) Skripsi
- Lampiran 7 Surat Permohonan Perpanjangan SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Fotokopi Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 10 Surat Keterangan Revisi
- Lampiran 11 Lembar Persetujuan Revisi
- Lampiran 12 Tabel Distribusi r
- Lampiran 13 Tabel Distribusi t
- Lampiran 14 Tabel Distribusi F
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian otonomi daerah yang termuat tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang (UU Nomor 32 tahun 2004).

Sistem desentralisasi merupakan sistem yang mengatur pemerintahan, dimana para pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri, dan kemudian membuat laporan pertanggung jawabannya kepada pemerintah pusat atas kegiatan yang sudah dilakukan. Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, perlu adanya upaya pengembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Diharapkan, dengan adanya

laporan keuangan, baik laporan keuangan pusat ataupun daerah, akan dapat memenuhi fungsinya, yakni sebagai wujud dari kepatuhan dan pengelolaan sumber daya sesuai peraturan yang ditetapkan, akuntabilitas dan pelaporan prospektif, dasar perencanaan dan informasi otoritas, kelangsungan organisasi, hubungan dengan masyarakat, serta sebagai alat pengambilan keputusan organisasi pemerintahan yang bijak (Mardiasmo, 2002).

Instansi wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya. Kebutuhan pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan menuntut pemerintah untuk memperhatikan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karena laporan keuangan dapat menjadi alat dan cerminan untuk mengetahui apakah pemerintahan telah berjalan dengan baik atau tidak. Laporan Keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Saat ini, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kelima kalinya Pemkab Bandung Barat mendapatkan opini WDP, penyebab gagalnya Pemkab meraih opini WTP pada LKPD tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni soal pengelolaan aset. Meski sudah bertahun-tahun, masalah aset memang sulit diselesaikan. Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan KBB Kholid Nurjamil menilai, gagalnya Pemkab

meraih WTP menunjukkan tidak adanya progres yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi-rekomendasi BPK sebelumnya. Dengan kondisi itu, dia meminta agar Pemkab meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya (www.pikiran-rakyat.com, diunduh tanggal 5 Juni 2017).

LKPD Kabupaten Bandung Barat masih saja mendapatkan opini WDP untuk laporan keuangan periode 2017 kemarin, yang membuatnya menjadi genap 6 tahun berturut-turut meraih opini WDP, padahal pemerintah sempat merasa optimis akan meraih opini WTP. Untuk Kabupaten Bandung Barat, ditemukan persoalan mengenai belanja pemeliharaan yang tak didukung rinciannya. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pembukuan, hingga beban persediaan vaksin tanpa rincian (news.detik.com, diunduh tanggal 30 Mei 2018).

Sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi faktor yang sangat penting, karena langsung berperan aktif dalam pembuatan laporan keuangan yang menjadi alat pertanggungjawaban. Salah satu yang penting terkait pembuatan laporan keuangan adalah kompetensi dari pada sumber daya manusia itu sendiri. Kegagalan yang dialami SDM, dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk (Soimah, 2014).

Permasalahan lain pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah masalah pengelolaan barang milik daerah yang berhubungan dengan aset tetap

dan kepemilikannya serta saldo yang kurang didukung perinciannya. (jabar.tribunnews.com, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2018).

Pengelolaan aset berupa BMD perlu menjadi perhatian serius. BMD mesti dikelola secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syafaruddin : 2018). Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (M.Yusuf, 2010:8).

Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan; penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemafaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi (Permendagri No.19 Tahun 2016).

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelola Barang Milik Negara Daerah, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam *management* pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik daerah yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, karena jumlah dan nilai aset yang tersaji di laporan keuangan akan menjadi cerminan kondisi optimal daerah kita (Basirun, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Kinayanti dan Erawati (2016), Pujanira (2017), Siahaya (2016) , Karsana & Suarnaya (2017) dan Rahayu (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang telah dikaji oleh Anshari (2016) dan Poae, dkk (2016)

menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang telah dikaji oleh Triwahyuni (2016) dan menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data-data, berita fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dan mendalami tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, pertanyaan atas masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat?

5. Bagaimana pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat?
6. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Bagi Teoritis

Sehubungan dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Pembaca

Semoga hasil dari penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah kontribusi pemikiran atau sebagai bahan kajian lebih lanjut dari penelitian terdahulu, maupun dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sebelumnya bagi pihak yang membutuhkan referensi

dimasa yang akan datang. Terutama yang berhubungan dengan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .

1.4.2 Kegunaan Bagi Praktis

Bagi Pemerintahan Daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang dapat diterima dengan baik dan diaplikasikan pada organisasi pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan implementasi kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sebagai suatu upaya untuk terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian, pada Dinas dan Badan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Jalan Padalarang - Cisarua Km.2, Ngamprah, Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552).

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Definisi Kompetensi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS dalam menjelaskan bahwa yang disebut sebagai kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.”

Menurut Rychen, Salganik & McLaughlin (2003 : 4) dikutip Saleh (2013:21) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“a competency is more than just knowledge and skill. It involves the ability to meet complex demands, by drawing on and mobilising psychological resource (including skills and attitudes) in a particular context”.

Oleh sebab itu agar seorang aparatur memiliki peran yang tinggi dalam memahami dan menyiasati dunia yang sedang berubah ini. Mereka sangat membutuhkan kompetensi personal sebagai pegangan yang kokoh yang dapat mereka gunakan untuk mengantisipasi terhadap semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini dan pada masa-masa yang akan datang nanti. Disamping itu, dengan berbekal kompetensi personal yang tinggi, mereka tidak saja mampu menyelesaikan tugas-tugas rutin, tetapi lebih dari itu mereka juga akan dapat

memanfaatkan dan mengakses berbagai informasi yang tersedia, yang tersebar luas di berbagai belahan dunia ini, yang dapat mereka manfaatkan untuk mendukung dalam melakukan peningkatan kualitas jasa pelayanan publik.

Sedangkan definisi kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas No: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa:

“Kompetensi adalah merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pekerjaan “tertentu”.

Salah satu ciri khas dari definisi yang dibuat oleh Pendidikan Nasional (DIKNAS) tersebut, bahwa Sumber Daya Manusia itu, disamping harus memiliki kompetensi personal dari sisi aspek materil, juga membicarakan tentang kompetensi personal dari aspek moril, yang tertuang dalam ungkapan “penuh tanggung jawab”. Implikasi praktis dari definisi ini adalah, apabila seorang aparatur itu benar-benar memiliki kompetensi personal yang maksimal, maka segala kompetensi personal yang dimilikinya tersebut, harus dicurahkan secara totalitas dalam mengerjakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Oleh sebab itu agar seorang aparat itu memiliki peran yang tinggi dalam memahami dan menyiasati dunia yang sedang berubah ini, mereka sangat membutuhkan kompetensi personal sebagai pegangan yang kokoh yang dapat mereka gunakan untuk mengantisipasi terhadap semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini dan pada masa-masa yang akan datang nanti. Disamping itu, dengan berbekal kompetensi personal yang tinggi, mereka tidak saja mampu menyelesaikan tugas-tugas rutin, tetapi lebih dari itu mereka juga akan dapat memanfaatkan dan mengakses berbagai informasi yang tersedia, yang tersebar

luas di berbagai belahan dunia ini, yang dapat mereka manfaatkan untuk mendukung dalam melakukan peningkatan kualitas jasa pelayanan publik (Saleh, 2013: 21).

2.1.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut Wirawan (2015:20) mendefinisikan pengertian sumber daya manusia sebagai berikut:

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang -pegawai, karyawan, buruh- yang bekerja untuk suatu organisasi , perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tentara, polisi, dan sebagainya yang direkrut untuk melaksanakan aktivitas manajemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Larasati (2018:1) menjelaskan pengertian sumber daya manusia sebagai berikut:

“Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, ataupun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi, misi dan tujuan untuk kepentingan manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.

Sumber daya manusia (*human resources*) mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk bisa menghasilkan barang dan jasa. Kedua, menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut (Idris, 2016:21).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dengan memberikan proses usaha kerja, baik dalam

produksi barang maupun jasa untuk mencapai tujuan perusahaan atau institusi tempat ia bekerja.

2.1.1.3 Komponen Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea dan Thoha (2007:28) dalam Busro (2018:32), terdapat tiga komponen pembentukan kompetensi, yaitu:

1. Pengetahuan yang dimiliki seseorang,
2. Kemampuan, dan
3. Perilaku individu.

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu, dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh karyawan yang berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi. Atau, dapat disimpulkan bahwa karyawan yang berpengetahuan kurang, akan mengurangi efisiensi.

Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan merupakan sebuah penilaian terkini atas apa yang dilakukan seseorang. Perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Dasar perilaku individu dapat dikaji dari empat variabel karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran.

2.1.1.4 Faktor-Faktor Pembentuk Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Chen (2011) ada enam faktor pembentuk kompetensi, sebagai kunci agar kita dapat menjadi professional yang kompeten, yaitu sebagai berikut:

a. Keterampilan

Keahlian atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan baik seperti mengemudi kendaraan, penguasaan bahasa, atau bongkar-pasang komputer.

b. Pengetahuan

Informasi atau penguasaan seseorang atas salah bidang ilmu pengetahuan seperti misalnya ilmu manajemen sumber daya manusia.

c. Peran Sosial

Citra Diri yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain atau *the other-self*, Misalnya menjadi seorang *follower* (pengikut), oposan, atau pemimpin.

d. Citra Diri

Persepsi seseorang yang melihat dirinya sendiri atau *inner-self*. Sebutlah misalnya orang yang melihat dirinya sebagai sosok yang rajin dan memposisikan diri sebagai pemimpin bagi yang lain.

e. Sifat dan Karakter

Pola yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang. Misalnya, pembelajaran yang tekun, pemimpin yang melayani, atau pengajar yang sabar.

f. Motivasi

Pemikiran atau niat dasar yang menjadi pendorong bagi seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Misalnya, dorongan untuk berprestasi, untuk dapat berpengaruh bagi orang lain, atau untuk dicintai.

2.1.1.5 Karakteristik Kompetensi

Menurut Spencer and Spencer (1993) dalam Sudaryo (2018:178), mengemukakan bahwa karakteristik kompetensi terdapat lima tipe, yaitu:

a. Motif (*motives*)

Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif merupakan suatu kondisi dalam diri individu yang mendorong, mengarahkan serta menentukan hasil yang dilakukannya. Dalam aktivitasnya itu terdapat suatu proses psikologis yang dapat menentukan intensitas perbuatan tersebut. Motif yang kurang kuat maka dorongan dan kemauannya tidak kuat, sehingga hasil pekerjaannya (*achievement*) tidak sesuai dengan kemampuan (*ability*). Jadi seseorang melakukan suatu tindakan disebabkan adanya suatu dorongan dalam dirinya dan merupakan tenaga penguat terjadinya perbuatan untuk mencapai tujuan. Motif merupakan suatu energi yang dimobilisasikan secara efektif, mengarah ke bagian dari lingkungan. Motif (*motives*) merupakan sesuatu yang konsisten dipikirkan atau diinginkan sehingga menyebabkan suatu tindakan atau tujuan tertentu dan tidak pada yang lainnya.

b. Watak (*traits*)

Watak merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respon terhadap rangsangan, tekanan, situasi atau informasi.

c. Konsep diri (*self-concept*)

Konsep diri merupakan gambaran tentang nilai luhur, yang dijunjung tinggi seseorang serta bayangan diri atau sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan dan kehidupannya. Sebetulnya sikap itu tidak se-sederhana yang dibayangkan orang jika belum diwujudkan dalam bentuk perilaku. Sikap yang dalam psikologi sosial disebut sebagai *attitude* dapat saja mengarah kepada benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, nilai, dan lain-lain. Sikap juga dapat dipandang sebagai suatu reaksi suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang, yang kelihatan dari perilaku atau perasaan.

d. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengertian antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan sering kali kabur. Tetapi, umumnya di kalangan ilmuwan maupun para filsuf terdapat kesepakatan bahwa ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan sistematis. Demikian lazim perumusan demikian itu, sehingga pengertian ilmu sebagai aktivitas dan metode tampak terselubung dan kurang dikenal. Dalam hal ini, pengetahuan merupakan kemampuan seseorang yang terbentuk dari informasi yang dimiliki dalam bidang kajian tersebut.

e. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan fisik ataupun mental.

Dari komponen-komponen tersebut, keterampilan dan pengetahuan sifatnya dapat dilihat (*visible*) dan mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan perkembangan sumber daya manusia, sedangkan citra diri, watak, motif sifat tidak tampak (*hidden*) dan lebih sulit untuk dikembangkan melalui program pelatihan perkembangan SDM.

2.1.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang teknis pengelolaan barang milik daerah, mendefinisikan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.1.2.2 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah merupakan hal penting, karena PMBD adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar (Pangaribuan dan Sumini, 2010 : 8).

2.1.2.3 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, terdapat rangkaian kegiatan dan tindakan Barang Milik Daerah, yakni:

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

b. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

f. Penilaian

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

h. Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.

i. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

j. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kebijakan terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Negara/Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Negara.

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau, b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Kualitas

Menurut KBBI, mendefinisikan kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, drajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya), dan mutu.

2.1.3.2 Pengertian laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (Revisi 2009) tentang penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa laporan keuangan merupakan informasi tentang kondisi keuangan yang berkaitan dengan posisi kinerja keuangan entitas.

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan operasional;
5. Laporan arus kas;
6. Laporan perubahan ekuitas; dan
7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

1) Laporan Realisasi Anggaran

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara / bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk daan perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau tidak akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan perubahan SAL)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunaan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Laporan Operasional

Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK meliputi penjelasan jaratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, laporan perubahan SAL, laporan operasional, LPE, neraca dan laporan arus kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CALK berisikan hal-hal berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro.
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

- f. Mengungkapka informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan Keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUID. Laporan Keuangan Pemda ini dibuat setiap semester /tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.

Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD/BUD. Pada saat akan disusun, laporan keuangan Pemda maka laporan keuangan SKPD dan PPKD digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Format laporan keuangan SKPD sama dengan laporan, keuangan SKPD. Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan transaksi dan akun yang digunakannya.

Adapun komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen laporan keuangan di tingkat SKPD terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.3.4 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Yadiati (2017:7) Laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, yakni relevan, penyajian jujur, dapat dibandingkan, ketepatan waktu, dapat diverifikasi, dan dapat dipahami. Yang dapat memberikan *output* berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan.

2.1.3.5 Karakteristik Laporan Keuangan Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaanya Informasi. Informasi yang relevan adalah:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas.

2) Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

2.1.3.5 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam PSAK no. 1 dijelaskan tujuan laporan keuangan, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat, berguna bagi manajemen, dan para direksi dalam mengambil keputusan terkait kepentingan pemilik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ida Ayu Kiranayati dan Ni Made Erawati (2016) Jurnal: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus (2016) : 1290-1318 ISSN:2302-8556	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrua, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Persamaan: Menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah Perbedaan: Tidak menggunakan variabel independen Pemahaman Basis Akrua dan Sistem Pengendalian Interen. Tidak menggunakan objek penelitian di SKPD Kabupaten Bandung .
2.	Putriasri Pujianira (2017) Jurnal: Jurnal nominal Volume VI Nomor 2 Tahun 2017	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Persamaan : Menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia. Variabel Dependen :Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Perbedaan: Tidak menggunakan variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Tidak menggunakan objek penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
3.	Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi, dan Paulus K. Allo Layuk. (2016) Jurnal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua	Persamaan: Menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia. Variabel dependen :Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Perbedaan: Tidak menggunakan variabel independen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Tidak menggunakan objek penelitian di Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4.	I Wayan Karsana & I Gusti Ngurah Agung Suarnaya (2017) Jurnal : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017) ISSN: 2302-8556	Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli	Persamaan: Menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan: Tidak menggunakan variabel independen Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Pengendalian Internal. Tidak mengguankan objek penelitian di Pemerintahan Kabupaten Bangli.
5.	Mustika Triwahyuni (2016) Jurnal: JOM Fekon Vol.3 No.1 (Februari) 2016	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)	Persamaan : Menggunakan variabel independen Sumber Daya Manusia. Variabel Dependen :Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (SKPD) . Perbedaan: Tidak menggunakan variabel independenPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan.Tidak mengguankan objek penelitian di Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6.	Liza Rahayu, Kennedy, dan Yuenita Anisma (2014) Jurnal: JOM FEKON Vol.1 No.2 Oktober 2014	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Persamaan: Menggunakan variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia. Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perbedaan: Tidak menggunakan variabel independen Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi.

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Pemerintah (SAP). Tidak menggunakan objek penelitian di Pemerintahan Provinsi Riau (SKPD Provinsi Riau).
7.	Anshari (2016) Jurnal: Universitas negeri Padang Vol.4 No.1 (2016)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang	Persamaan: Menggunakan variabel independen Pengelolaan Barang Milik Daerah. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Perbedaan: Tidak menggunakan objek penelitian di Pemerintahan Kota Padang.
8.	Poae, dkk (2016) Jurnal: Vol.8 No.1 (2017)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Taulan	Persamaan: Menggunakan variabel independen Pengelolaan Barang Milik Daerah. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan: Tidak menggunakan objek penelitian di Pemerintahan Kota Padang.

Sumber : Data Diolah Penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dinamika bisnis dan dunia usaha menuntut organisasi untuk lebih dinamis. Dengan begitu, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi dinamika organisasi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang memiliki nilai yang kuat, fleksibel, dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Untuk itu sumber daya manusia harus memiliki kapasitas yang dibangun diatas fondasi yang kuat, yang sesuai dengan tuntunan usaha. Sumber daya yang berbasis kompeten dapat meningkatkan kapasitas dan membangun pondasi karena apabila orang-orang yang bekerja dalam organisasi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Orang-orang tersebut mampu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun mental serta karakter produktifnya. Dengan memiliki nilai (*value*) yang kuat, mereka akan selalu siap menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan organisasi tanpa menghalangi jati dirinya (Hutapea dan Thoha , 2008: 86)

Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah, pimpinan entitas dan lembaga, dengan demikian opini wajar tanpa pengecualian, mencerminkan kualitas laporan keuangan, yang sesuai dengan standar akuntansi dan merupakan kewajiban dan hasil kerja pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara (Djanegara, 2017). Kolaborasi antara standar dan sistem akuntansi yang baik, serta SDM yang kompeten, akan menjamin meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kompetensi sumber daya manusia juga dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Kompetensi sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan (Rahim, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinayati dan Erawati (2016), Pujanira (2017), Siahaya (2016), Karsaan dan Suarnaya (2017), dan Rahayu (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

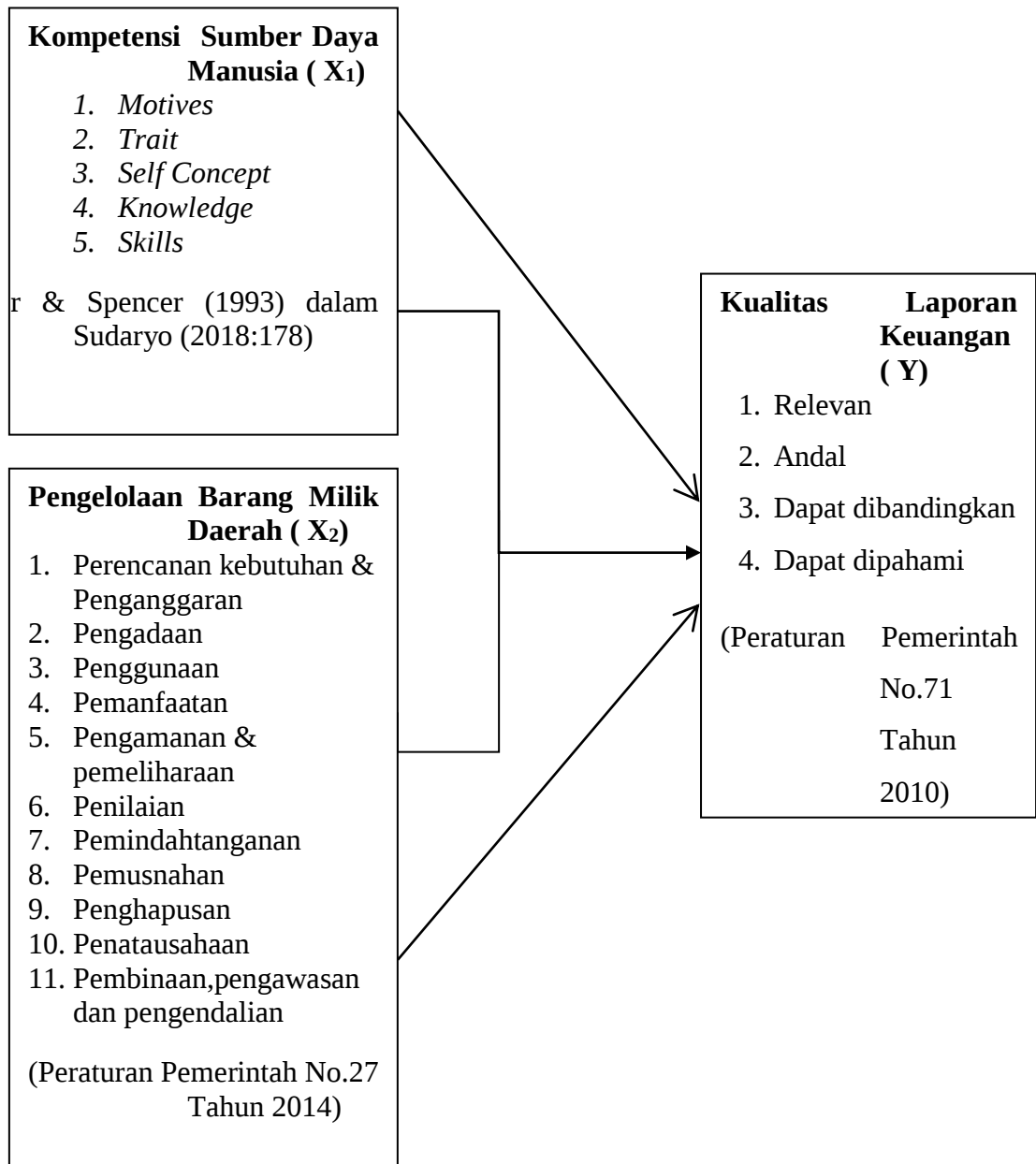
Untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, diperlukan keseriusan dan ketelitian dari para pengurus barang milik daerah. Dalam menyusun neraca daerah hanya dapat dilakukan apabila di setiap SKPD melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara baik dan benar sesuai dengan kodefikasi yang benar (Vinsen, 2018).

Semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyajikan laporan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik negara/daerah (Meiliana, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan komponen dari upaya peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah. Lemahnya pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor yang menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini wajar dengan pengecualian, yang disebabkan kurang mampunya mewujudkan tata kelola aset/barang pemerintah secara baik (Hidayati *et al*, 2016). Pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik (M.Yusuf, 2004).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya telah dikaji oleh Anshari (2016) dan Poae, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Peneliti menggambarkan paradigma penelitian, pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Data Diolah

2.4 Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukan suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Sugiono (2017:84) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka pemikiran teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran serta hubungan antara variabel yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis 2: Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis 3: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah secara bersama-sama berpengaruh
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2017:41) pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengelolaan Barang Milik Daerah (X2), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Metode yang Digunakan

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.”

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. MenurutMaksum (2012:68) pengertian penelitiandeskriptif adalah sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan gejala, fenomena atau peristiwa tertentu. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapat informasi terkait dengan fenomena kondisi, atau variabel tertentu dan tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis”.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang kompetensi SDM, pengelolaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode verifikatif menurut Sugiyono (2017:21) adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode verifikatif menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menjelaskan tentang adakah pengaruh kompetensi SDM dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandunng Barat.

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional Variabel diperlukan untuk menentukan jenis indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:39), pengertian variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Independen/bebas (Variabel X)

Menurut Sugiyono (2017:39), mendefinisikan bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1) dan Pengelolaan Barang Milk Daerah (X_2).

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat (Y)

Menurut Sugioyono (2017:39) mendefinisikan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen (variabel terikat) yang akan diteliti adalah kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM dan pengelolaan barang milik daerah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Operasional variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Poin di Kuisioner
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁)	Kompetensi sumber daya manusia dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Kompetensi sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan (Rahim, 2015).	1. <i>Motives</i>	Ordinal	1-3
		2. <i>Trait</i>	Ordinal	4-5
		3. <i>Self Concept</i>	Ordinal	6-7
		4. <i>Knowledge</i>	Ordinal	8-9
		5. <i>Skills</i> (Spencer & Spencer, 1993 dalam Sudaryo, 2018:178)	Ordinal	10-11

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Poin di Kuisioner
Pengelolaan Barang Milik Daerah (X ₂)	Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang teknis pengelolaan barang milik daerah).	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Ordinal	12-14
		2. Pengadaan	Ordinal	15
		3. Penggunaan	Ordinal	16
		4. Pemanfaatan	Ordinal	17
		5. Pengamanan dan pemeliharaan	Ordinal	18-19
		6. Penilaian	Ordinal	20
		7. Pemindahtanganan	Ordinal	21
		8. Pemusnahan	Ordinal	22
		9. Penghapusan	Ordinal	23
		10. Penatausahaan	Ordinal	24-26
		11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 2014)	Ordinal	27-32

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Poin di Kuisioner
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, yakni relevan, penyajian jujur, dapat dibandingkan, ketepatan waktu, dapat diverifikasi, dan dapat dipahami. Yang dapat memberikan <i>output</i> berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. (Yadiati, 2017:7)	1. Relevan	Ordinal	33-35
		2. Andal	Ordinal	36-39
		3. Dapat dibandingkan	Ordinal	40-41
		4. Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010)	Ordinal	42-43

(Sumber: Data Diolah)

Dalam operasional variabel ini menggunakan skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa sehingga menunjukkan perbedaan diantara berbagai kategori, namun juga menentukan urutan kategori dengan cara yang berarti (Sekaran, 2017:170). Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala *likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan (Sugiono, 2017:93)

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skala ordinal digunakan bertujuan untuk memberikan informasi berupa bobot nilai pada jawaban.

3.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiono (2017: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dapat disimpulkan bahwa populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek-objek satuan atau individu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 45 SKPD.

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No	Nama SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman
5	Dinas Sosial
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Dinas Perikanan dan Peternakan
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21	Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama SKPD
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	Sekretariat Daerah
28	Sekretariat DPRD
29	Inspektorat Daerah
30	Kecamatan Ngamprah
31	Kecamatan Cipatat
32	Kecamatan Batujajar
33	Kecamatan Padalarang
34	Kecamatan Sindangkerta
35	Kecamatan Cipongkor
36	Kecamatan Gununghalu
37	Kecamatan Rongga
38	Kecamatan Cililin
39	Kecamatan Cikalong Wetan
40	Kecamatan Cipendeuy
41	Kecamatan Parongpong
42	Kecamatan Cisarua
43	Kecamatan Lembang
44	Kecamatan Cihampelas
45	Kecamatan Saguling

(Sumber : Data Diolah)

3.3.2 Sampel

Sampling adalah suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, yaitu tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi) akan tetapi sebagian saja dari populasi.

Menurut Sugiyono (2017:81) menyatakan bahwa teknik sampling adalah:

“ Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel mana yang akan digunakan dalam penelitian.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *nonprobability sampling*.

Menurut Sugiyono (2010:63), *non probably sampling* adalah :

“Teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, hal ini dilakukan karena teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu tergantung dari kriteria yang digunakan (Sugiyono, 2017:218).

Kriteria anggota populasi yang menjadi sampel yaitu kepala sub bagian keuangan dan staff bagian keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kriteria tersebut dipilih karena instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintahan yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan keuangan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten. Alasan lainnya dalam penentuan jumlah sampel yaitu dengan pertimbangan bahwa dalam ruang lingkup SKPD terutama pada dinas, inspektorat maupun sekretariat ruang lingkup keuangannya lebih luas dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki ruang lingkup bagian keuangan yang terbatas.

Sampel yang diambil mewakili dan diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 SKPD. Adapun sampel tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	3
2	Dinas Kesehatan	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	3
5	Dinas Sosial	3
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3
8	Dinas Lingkungan Hidup	3
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
11	Dinas Perhubungan	3
12	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	3
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	3
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3
21	Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah	2
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3

No	Nama SKPD	Jumlah
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3
27	Sekretariat Daerah	2
28	Sekretariat DPRD	1
29	Inspektorat Daerah	3
Jumlah		83

(Sumber : Data Diolah)

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2017:225) . Dilihat dari data yang dibutuhkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:225).

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara *interview* atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu

luas, sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu lama(Sugiyono, 2017:142).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner, dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Studi Pustaka

Menurut Sekaran (2017:291) survei literatur adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik, evaluasi penelitian terkait dengan masalah, dan dokumentasi penelitian. Penelitian ini dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan keandalan teoritis yang dapat dijadikan pedoman dalam membandingkan teori yang didapat dengan praktik dilapangan, yaitu dengan membaca *literature* yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, membaca buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang telah terkumpul melalui kuesioner, kemudian penulis olah dalam bentuk kuantitatif, yaitu dengan cara menetapkan skor jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab dari responden, dimana mempunyai 5 (lima) kemungkinan jawaban yang diberi skor berdasarkan skala interval dengan metode *likert*. Skala *likert* mempunyai interval 1-5. Pemberian skor dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Pemberian bobot nilai (skor) skala likert

Pernyataan	Nilai (skor)
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

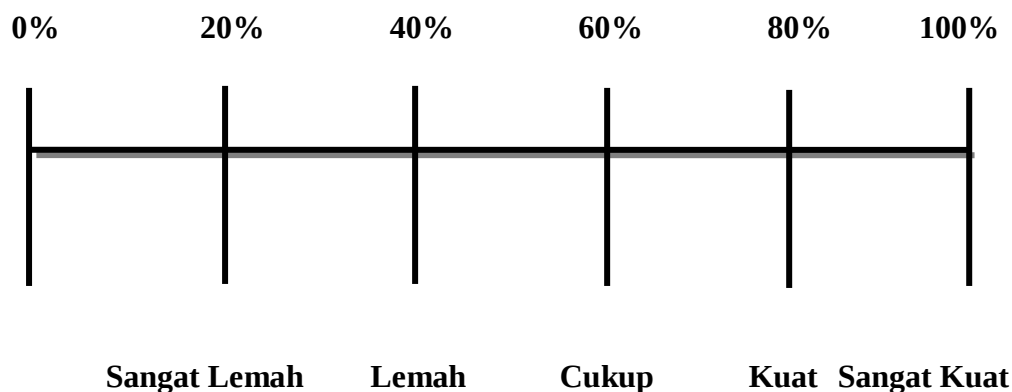
Sumber : Sugiyono (2017:94)

Dalam pengumpulan data kuesioner, terdapat rekapitulasi hasil kuesioner dalam penelitian ini. Adapun perhitungan dalam penelitian ini adalah skor aktual dan skor ideal. Skor aktual merupakan perhitungan seluruh pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh menggunakan garis kontium (100%) dan skor minimum (0%).

Tabel 3.5
Kriteria Interpretasi Skor Tanggapan Responden

No	% JumlahSkor	Kriteria
1	0%-20%	SangatLemah
2	21%-40%	Lemah
3	41%-60%	CukupKuat
4	61%-80%	Kuat
5	81%-100%	SangatKuat

Sumber : Riduan dan Kuncoro (2014:22)



3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017:244). Berikut analisis yang digunakan:

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016:52) uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu Kuesiner dikatakan dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Menurut Sugiyono (2013:121) menyatakan bahwa :

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas instrumen yang digunakan adalah validitas isi dengan analisis item, yaitu dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total.

Peneliti menggunakan teknik pengujian koefisien dengan menggunakan metode *pearson* dan pengukurannya menggunakan SPSS versi 23.0 dengan langkah berikut ini:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 : Pernyataan tidak valid dengan total skor variabel

H_1 : Pernyataan valid dengan total skor variabel

2. Menentukan kriteria uji

- a. Jika koefisien korelasi (r) bernilai (+) dan $> T_{\text{tabel}}$, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah.

- b. Jika koefisien korelasi (r) bernilai (-) dan $< T_{\text{tabel}}$, maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tersebut tidak valid atau tidak sah.

3. Menarik kesimpulan

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017:135) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan keandalan instrument yang menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan metode *cronbach's alpha*. Instrument dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's*

alpha pada nilai 0,601-0,80 dan dapat dikatakan sangat reliabel jika nilai *cronbach's alpha* berada pada nilai 0,801-1,00. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23.0 dan uji statistik *cronbach's alpha*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis
 H_0 : Pertanyaan atau pernyataan tidak reliabel
 H_a : Pertanyaan atau pernyataan reliabel
2. Menentukan kriteria uji
 - a. Jika *cronbach's alpha* < 0,601 maka H_0 ditolak
 - b. Jika *cronbach's alpha* $\geq$ 0,601 maka H_0 diterima
3. Menarik kesimpulan

3.5.3. Method of Successive Interval (MSI)

Untuk menemukan kategori jawaban responden terhadap masing-masing alternatif terlebih dahulu skala ordinal ditransformasikan menjadi skala interval dengan menggunakan teknik MSI (*Method Successive Interval*) dengan cara berikut:

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuisioner yang disebarkan.
2. Pada setiap butir ditentukan berapa orang yang mendapatkan skor 1,2,3,4 dan 5 yang disebut sebagai frekuensi.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.

4. Menentukan nilai frekuensi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor
5. Menggunakan tabel distribusi normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
6. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh.
7. Menentukan nilai skala dengan menggunakan rumus:

$$\text{SCALE VALUE} = \frac{\text{Density at Upper Limit} - \text{Density at Lower Limit}}{(\text{Area Under Upper Limit}) - (\text{Area Under Lower Limit})}$$

Keterangan :

Density at Lower Limit = Kepadatan Batas Bawah

Density at Upper Limit = Kepadatan Batas Atas

Area Under Upper Limit = Daerah di Batas Atas

Area Under Lower Limit = Daerah di Batas Bawah

Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu Skala Values (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan jawaban responden yang terkecil melalui transformasi berikut:

$$[\text{NS} + | \text{NS min} | + 1] = Y$$

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Sebagai upaya untuk memperoleh model penelitian yang baik maka model penelitian harus memenuhi uji asumsi klasik. Asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang biasa digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

3.5.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016:154) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apakah masing-masing variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya.

Menurut Ghazali (2016:158) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significance*) yaitu:

- a. Jika data menyebar disekitar garis regional dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Alat uji yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik *kolmogorof-Smirnov* (K-S). Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis
 H_0 : Data terdistribusi secara normal
 H_1 : Data tidak terdistribusi secara normal
2. Menentukan kriteria pengujian
 - a. Apabila nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp, Sig. (2-tailed)* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima atau menunjukkan data berdistribusi secara normal.
 - b. Apabila nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp, Sig (2-tailed)* $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau menunjukkan data tidak berdistribusi secara normal.
3. Menarik kesimpulan

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2016:103) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{Tolerance}$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. (Ghozali, 2016:104). Pengujian uji multikolinieritas menggunakan bantuan SPSS Ver. 23.0.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis
 - H_0 : tidak terdapat multikolinieritas
 - H_1 : terdapat multikolinieritas
2. Menentukan kriteria uji
 - a. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
 - b. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ dan nilai $VIF \geq 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Keterangan : $VIF = \text{Variance Inflation Factor}$

- c. Menarik kesimpulan

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi keditaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

Terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari metode Glejser. Menurut Suliyanto (2011:98) Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya apabila titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2017:134). Dalam pengujian ini yaitu dengan menggunakan SPSS Ver. 23.0 dengan melihat grafik *scatterplot*, dan pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser.

Adapun pengambilan keputusannya sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu pada grafik *scatterplot*, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas terbentuk, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis ini terdapat 3 (tiga) variabel. Digunakan dengan melibatkan variabel dependen, yakni kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dan variabel independen, yakni kompetensi sumber daya manusia (X1) dan pengelolaan Barang Milik Daerah (X2). Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Sumber : Sugiyono (2017:192)

- Y = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- a = *intercept* (konstanta) atau nilai rata-rata Y prediksi jika $X_1=X_2=0$
- a, b₁, b₂ = koefisien regresi
- X₁ = kompetensi sumber daya manusia
- X₂ = pengelolaan barang milik daerah
- b₁ = besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X₁ naik/turun satu satuan dan X₁ konstan
- b₂ = besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, jika X₂ naik/turun satu satuan dan X₂ konstan
- + atau - = tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X₁, X₂
- E = kesalahan (*error*)/tingkat pengganggu

3.5.6 Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Peneliti menggunakan teknik pengujian koefisien korelasi *pearson product moment* karena data yang diukur merupakan data ordinal yang diperoleh dari kuisioner berupa skala *likert* dan menggunakan analisis linier berganda. Korelasi *pearson product moment* digunakan untuk mencari kedekatan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang memiliki skala pengukuran berupa skala ordinal. Rumus koefisien korelasi *pearson product moment* adalah :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\left(n \sum (X)^2 - (\sum X)^2 \right) \left(n \sum (Y)^2 - (\sum Y)^2 \right)}}$$

Keterangan :

r = koefisien korelasi antara X terhadap Y

X = Variabel A

Y = Variabel B

n = Jumlah Sampel

Pengukuran *pearson product moment* ini dilakukan dengan SPSS ver. 23.0 dari koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan korelasi antara kedua variabel yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,09 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,00	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:184)

3.5.7 Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2016:95), koefisien determinansi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R2* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik, karena tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Adapun rumus untuk mencari koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien yang diukur, yaitu :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi diterima). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.8 Pengujian Hipotesis

Menurut Danang Sunyoto (2016:29) menyatakan tujuan uji hipotesis sebagai berikut:

"Tujuan uji beda atau uji hipotesis ini adalah menguji harga-harga statistik, mean dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awal (nihil) diterima atau ditolak. Dilakukan pengujian harga-harga statistik dari suatu sampel karena hipotesis tersebut bisa merupakan pernyataan benar atau pernyataan salah".

Penelitian ini melakukan uji hipotesis yang menunjukkan ada tidaknya hubungan yang positif antara variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (X_2) dengan variabel kualitas laporan keuangan (Y). Dalam hal ini hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dengan dependen. Hipotesis *alternative* (H_1) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dari penjelasan hipotesis yang peneliti kemukakan, dapat diuji apakah variabel *independen* secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan tidak terhadap variabel *dependen*.

3.5.8.1 Uji Statistika t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variansi variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing – masing variabel yang terdapat pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS. Jika nilai probabilitas signifikansi $t < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah dengan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah. Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial yaitu:

a. Menentukan H_0

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

$H_0: \beta = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_1: \beta \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

$H_0: \beta = 0$: Tidak terdapat pengaruh signifikan pengelolaan barang milik daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

$H_1: \beta \neq 0$: Terdapat pengaruh signifikan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Menentukan tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan
(dk) = ($\alpha/2$, n-k-1).

c. Nilai t hitung

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

r = korelasi parsial

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel

d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan:

1. H_0 diterima (tidak berpengaruh) bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$
2. H_0 ditolak (berpengaruh) bila $t_{hitung} < t_{tabel}$

Selain itu dapat juga ditentukan dengan melihat tingkat probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka berdasarkan perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$, maka berdasarkan perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Uji Signifikansi parameter individual (uji statistik t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing – masing variabel. Apabila *p-value* < 5%

maka hipotesis diterima dan apabila $p\text{-value} > 5\%$ maka hipotesis ditolak. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 23.0 untuk melakukan seluruh pengolahan data yang diperlukan, demi menunjang hasil penelitian ini secara lengkap dan akurat.

3.5.8.1 Uji Statistika F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan tingkat signifikansi (α) Sugiyono (2017:162) menyatakan tingkat signifikansi (*significant level*) yang sering digunakan adalah sebesar 5% atau 0,005, karena dinilai cukup ketat dalam menguji hubungan variabel-variabel yang diuji atau menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikansi 0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai 95% kebenarannya atau toleransi kesalahan sebesar 5%. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
3. Uji F yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan signifikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan

barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh signifikan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengelola barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_a : \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia dan pengelola barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Menghitung uji F

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi gabungan

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

c. Kriteria pengambilan keputusan

a) H_0 ditolak jika F statistik < 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$

b) H_0 diterima jika F statistik > 0,05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$

Nilai F_{tabel} didapat dari :

$$\mathbf{Df = n - k - 1}$$

$$\text{df (penyebut)} = n - k - 1$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

k = Variabel independen

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini adalah gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Penyebaran kuesioner ditunjukkan kepada seluruh SKPD Kabupaten Bandung Barat terdiri dari badan, dinas, inspektorat, sekretariat DPRD dan sekretariat daerah.

Karakteristik responden dimaksudkan untuk mengidentifikasi responden, sehingga lebih memudahkan dalam menganalisis dan pemahaman atas objek dan subjek penelitian. Untuk seluruh responden dalam penelitian ini peneliti membagikan kuesioner terhadap bagian keuangan pada seluruh SKPD tersebut.

4.1.1 Karakteristik responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan dari penelitian ini adalah sebanyak 83 responden. Responden merupakan seluruh karyawan bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Data mengenai responden adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Kuota

No	Nama SKPD	Responden	%
1	Dinas Pendidikan	3	3,61%

No.	Nama SKPD	Responden	%
2	Dinas Kesehatan	3	3,61%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	3,61%
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	3	3,61%
5	Dinas Sosial	3	3,61%
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3,61%
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3	3,61%
8	Dinas Lingkungan Hidup	3	3,61%
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3,61%
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3,61%
11	Dinas Perhubungan	3	3,61%
12	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	3	3,61%
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	3,61%
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3,61%
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	3,61%
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3	3,61%
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	3	3,61%
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3	3,61%
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	3,61%
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3,61%
21	Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah	2	2,40%
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3	3,61%
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	3,61%
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3,61%
25	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3,61%

No.	Nama SKPD	Responden	%
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3,61%
27	Sekretariat Daerah	2	2,40%
28	Sekretariat DPRD	1	1,20%
29	Inspektorat Daerah	3	3,61%
Jumlah		83	100%

Sumber : Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa mayoritas responden dalam penelitian di setiap SKPD berjumlah 3 orang, kecuali Sekretariat DPRD sebanyak 1 responden, Sekretariat Daerah sebanyak 2 responden dan Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah sebanyak 2 responden. Karena seluruh SKPD tersebut telah mengisi dan menyerahkan kembali kuesioner kepada peneliti secara lengkap.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

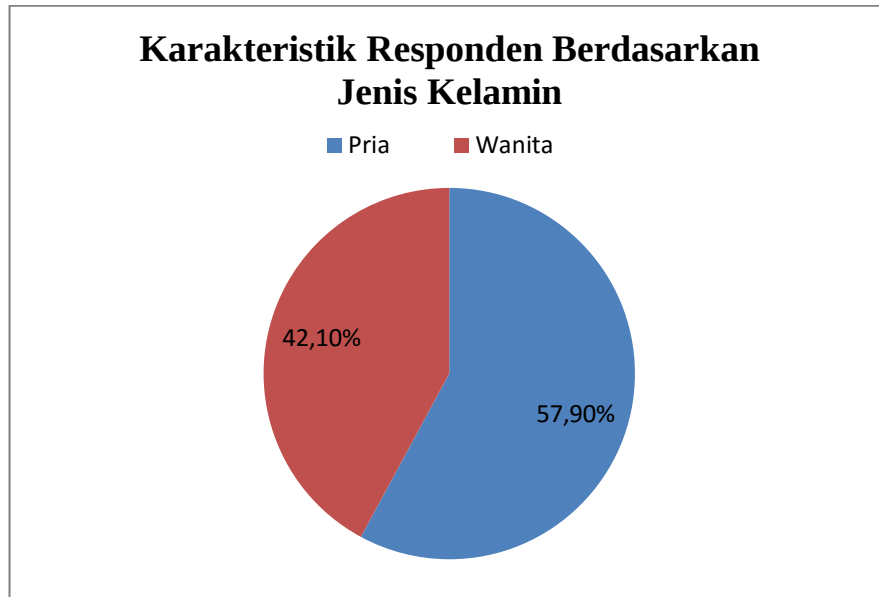
Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden	%
Pria	48	57,9
Wanita	35	42,1
Total	83	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria sebanyak 48 responden (57,9%). Berikut ini merupakan diagram hasil rekapitulasi mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 4.1

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Diolah

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

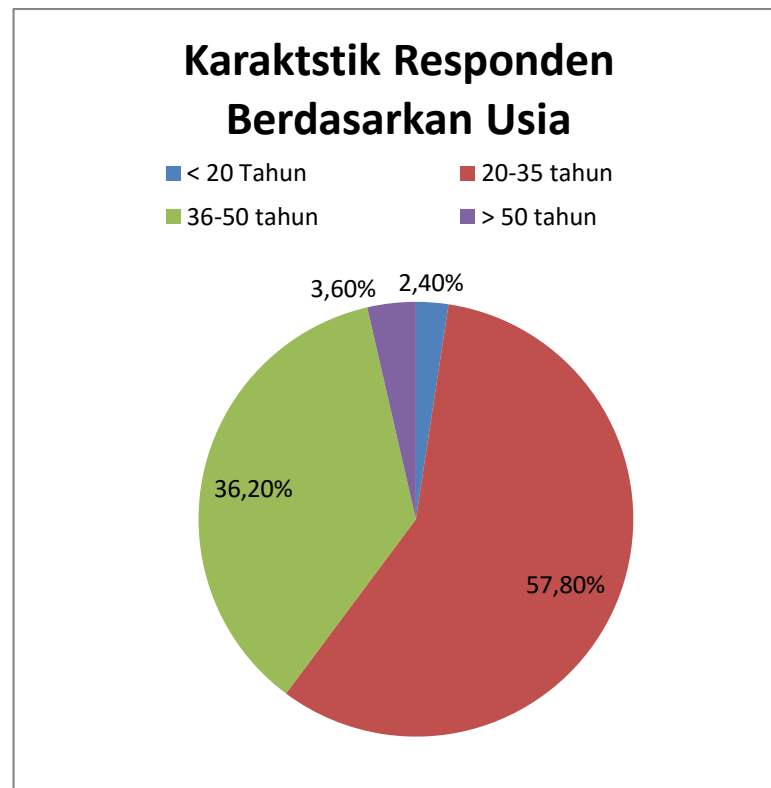
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Responden	%
<20 tahun	2	2,4
20-35 tahun	48	57,8
36-50 Tahun	30	36,2
>50 tahun	3	3,6
Jumlah	83	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 20-35 tahun sebanyak 48 responden (57,8%) sedangkan minoritas responden dalam penelitian ini adalah pada usia < 20 tahun

(2,4 %). Berikut ini merupakan diagram hasil rekapitulasi mengenai karakteristik responden berdasarkan usia.



Gambar 4.2

Diagram Responden Berdasarkan Usia

Sumber : Data Diolah

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

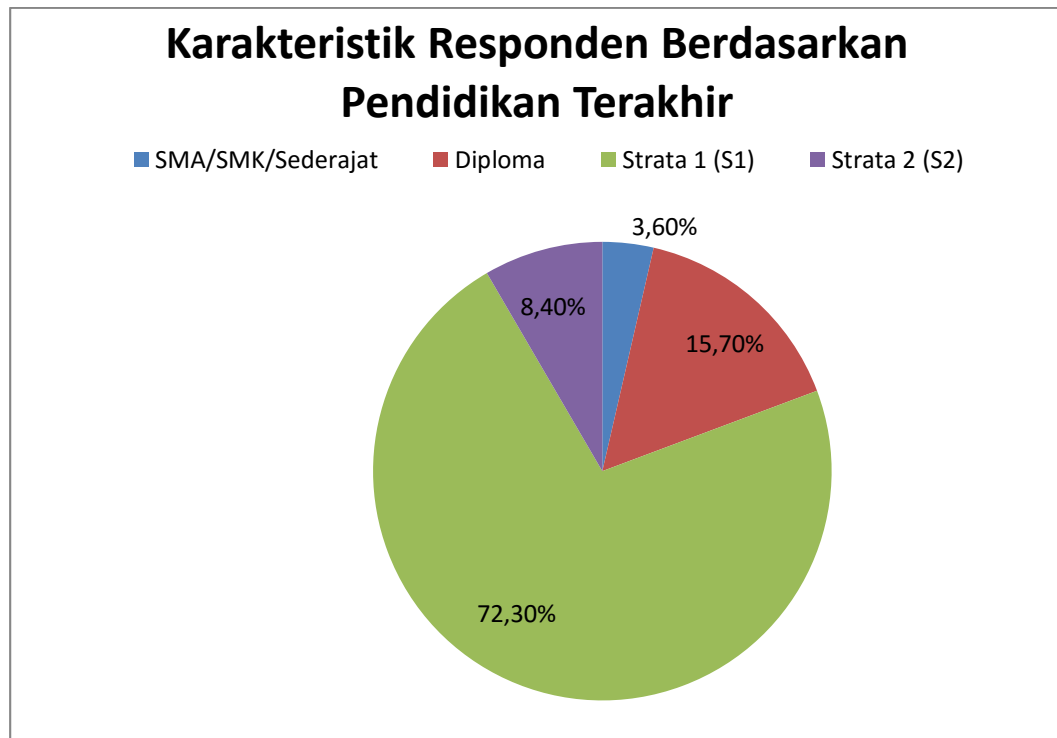
Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Responden	%
SMA/SMK/Sederajat	3	3,6
Diploma	13	15,7
Strata 1 (S1)	60	72,3
Strata 2 (S2)	7	8,4
Jumlah	83	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Strata 1 (S1) sebanyak 60 responden (72,3%). Minoritas responden dalam penelitian ini adalah SMA/SMK/Sederajat. Berikut ini merupakan diagram rekapitulasi mengenai karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.



Gambar 4.3

Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber : Data diolah

e. **Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

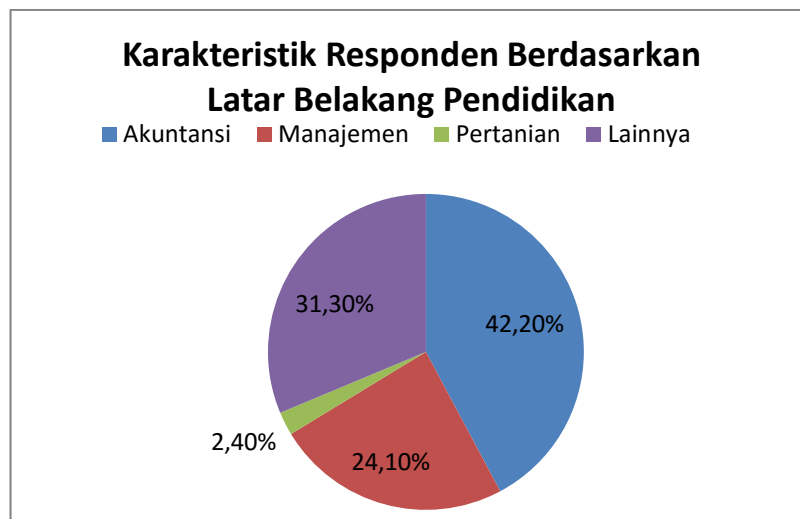
Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Responden	%
Akuntansi	35	42,2
Manajemen	20	24,1
Pertanian	2	2,4
Lainnya	26	31,3
Jumlah	83	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Akuntansi sebanyak 35 responden (42,2%), dapat disimpulkan pula bahwa dibagian keuangan ternyata masih banyak pegawai yang bukan dari jurusan Akuntansi dan Manajemen sebanyak 28 responden (33,73%). Berikut ini merupakan diagram hasil rekapitulasi mengenai karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikannya.



Gambar 4.4

Diagram Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Sumber : Data diolah

f. **Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

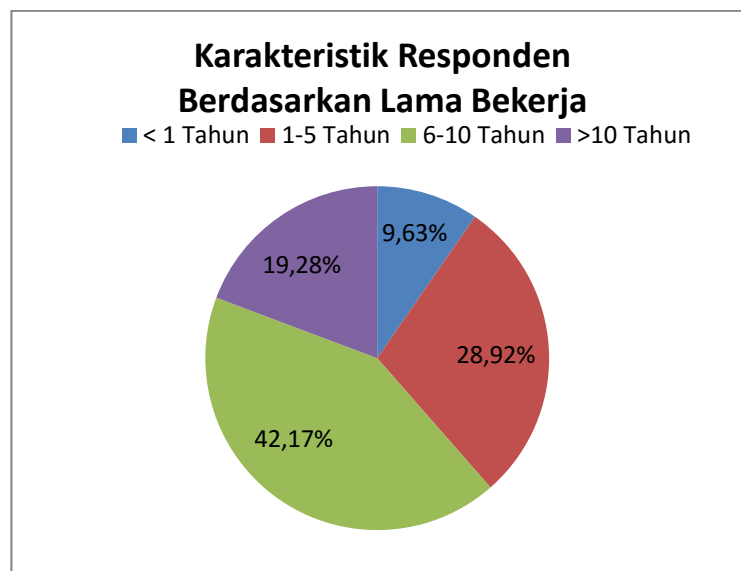
Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	%
< 1 Tahun	8	9,63%
1-5 Tahun	24	28,92%
6-10 Tahun	35	42,17%
>10 Tahun	16	19,28%
Jumlah	83	100%

Sumber: Kuesioner (Hasil Pengolahan Data Primer)

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu dengan lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 35 responden (42,17%). Minoritas responden dalam penelitian ini yaitu dengan lama bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 8 responden. Berikut ini merupakan diagram hasil rekapitulasi mengenai karakteristik responden berdasarkan lama bekerja.



Gambar 4.5

Diagram Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Sumber : Data Diolah

4.1.2 Gambaran Variabel Penelitian

4.1.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Untuk memudahkan penelitian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria penelitian sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	: diberikan bobot 5
Setuju (S)	: diberikan bobot 4
Ragu-Ragu (RR)	: diberikan bobot 3
Tidak Setuju (TS)	: diberikan bobot 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	: diberikan bobot 1

Tabel 4.7
Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	0%-20%	Sangat Lemah
2	21%-40%	Lemah
3	41%-60%	Cukup
4	61%-80%	Kuat
5	81%-100%	Sangat Kuat

(Sumber: Ridwan dan Kuncoro, 2014:22)

Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan 10 pertanyaan dan terdiri dari 5 indikator yang meliputi *Motives* (Motif), *Traits* (Watak), *Self Concept* (Konsep Diri), *Knowledge* (Pengetahuan) dan *Skill* (Keterampilan). Untuk mengetahui bagaimana penelitian dari responden mengenai kompetensi

sumber daya manusia pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	RR	TS	STS		
Q.1	12	18	0	0	0	30	132
Q.2	15	15	0	0	0	30	135
Q.3	13	15	2	0	0	30	131
Q.4	8	21	1	0	0	30	127
Q.5	11	19	0	0	0	30	131
Q.6	16	14	0	0	0	30	136
Q.7	9	17	2	2	0	30	123
Q.8	11	16	2	1	0	30	127
Q.9	8	21	1	0	0	30	127
Q.10	7	21	2	0	0	30	125
TOTAL SKOR TERCAPAI							1.294

(Sumber: Kuesioner Penelitian)

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

Indeks skor maksimum = bobot tertinggi x jumlah pernyataan x n

$$= 5 \times 10 \times 30$$

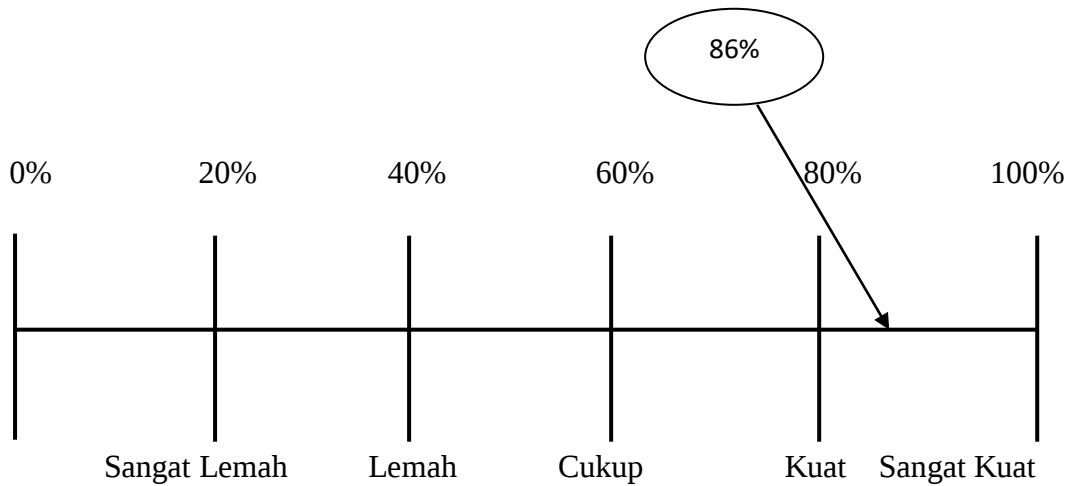
$$= 1500$$

Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pernyataan x n

$$= 1 \times 10 \times 30$$

$$= 300$$

$$\begin{aligned}\text{Presentase skor} &= (1294 : 1500) \times 100\% \\ &= 86,26\% \text{ dibulatkan menjadi } 86\%\end{aligned}$$



Gambar 4.6

Garis kontinum Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan perhitungan di atas, responden memberikan nilai sebesar 1249 dari skor ideal 1.500 (83,26%). Informasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, kompetensi sumber daya manusia pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah baik. Selain itu berdasarkan rekapitulasi jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden terdapat pada indikator *Self Knowledge* (Konsep Diri) pernyataan “Bapak/ibu dapat menjunjung tinggi nilai luhur & mematuhi norma-norma yang berlaku” dengan skor 136 dari 1294 (10,51%) dengan rata-rata jawaban didominasi dengan tanggapan sangat setuju dan setuju. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa para pegawai bagian keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki konsep diri dengan baik. Sedangkan jawaban terendah responden terdapat pada indikator *Knowledge* (Pengetahuan) pernyataan “Bapak/Ibu bekerja di bagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi” dengan skor 123 dari

1294(9,50%), serta pernyataan “ Bapak/Ibu yang memiliki pengetahuan di bidang Akuntansi selama ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat” dengan skor 129 (9,96%). Maka dari itu dengan persentase tersebut menunjukan bahwa para pegawai bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang belum memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan Akuntansi.

4.1.2.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur dengan 21 pertanyaan, yang terdiri dari 11 indikator, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Untuk mengetahui bagaimana penilaian dari responden mengenai pengelolaan barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	RR	TS	STS		
Q.1	6	24	0	0	0	30	126
Q.2	9	19	2	0	0	30	127
Q.3	10	19	1	0	0	30	129
Q.4	11	17	2	0	0	30	129
Q.5	11	19	0	0	0	30	131

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	RR	TS	STS		
Q.6	18	12	0	0	0	30	138
Q.7	18	11	1	0	0	30	137
Q.8	11	17	2	0	0	30	129
Q.9	10	18	2	0	0	30	128
Q.10	13	15	2	0	0	30	131
Q.11	12	15	3	0	0	30	129
Q.12	9	19	2	0	0	30	127
Q.13	13	17	0	0	0	30	133
Q.14	8	22	0	0	0	30	128
Q.15	6	22	2	0	0	30	124
Q.16	9	18	3	0	0	30	126
Q.17	8	20	2	0	0	30	126
Q.18	8	20	2	0	0	30	126
Q.19	7	22	1	0	0	30	126
Q.20	9	19	2	0	0	30	127
Q.21	6	22	2	0	0	30	124
TOTAL SKOR DICAPAI							2.701

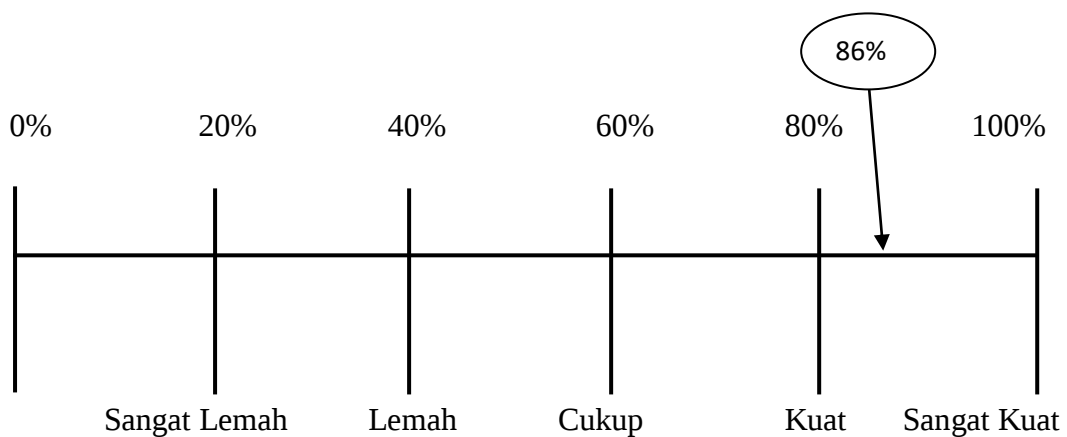
(Sumber: Kuesioner Penelitian)

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks skor maksimal} &= \text{bobot tertinggi} \times \text{jumlah pernyataan} \times n \\
 &= 5 \times 21 \times 30 \\
 &= 3150
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks skor minimum} &= \text{bobot terendah} \times \text{jumlah pertanyaan} \times n \\
 &= 1 \times 21 \times 30 \\
 &= 630
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase skor} &= (2701 : 3150) \\
 &= 85,74\% \text{ dibulatkan menjadi } 86\%
 \end{aligned}$$



Gambar 4.7
Garis Kontinum Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan perhitungan di atas, responden memberikan nilai sebesar 2701 dari skor ideal 3150 (85,74%). Informasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah baik. Selain itu berdasarkan rekapitulasi jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden terdapat pada indikator pemanfaatan pernyataan “Bidang aset telah melakukan pemanfaatan terhadap barang milik daerah yang sudah digunakan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunan serah guna, dan bangunan guna serah ” dengan skor 138 dari 2701 (5,10%) dengan rata-rata jawaban didominasi dengan tanggapan sangat setuju dan setuju. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa para pegawai bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pemanfaatan barang milik daerah dengan baik. Sedangkan jawaban terendah responden diantaranya terdapat pada indikator pemusnahan pernyataan “Proses pemusnahan barang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku” dengan skor 129 (4,77%), indikator pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan pernyataan “Pengurus barang dan penyimpanan barang mengikuti rapat

kerja, lokakarya, seminar dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah”dengan skor 126 (4,66%), indikator pengamanan dan pemeliharaan pernyataan “Bidang Aset melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik, maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, penyerobotan, dan pengambilalihanatau klaim pihak lain” dengan skor 126 (4,66%). Walaupun rata-rata jawaban responden menunjukkan sangat setuju dan setuju, namun dengan persentase tersebut mengindikasikan bahwa para pegawai bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya menjalankan pengelolaan barang milik daerah dengan baik.

4.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung Barat

Kualitas Laporan Keuangan diukur dengan 10 pertanyaan terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk mengetahui bagaimana penilaian responden mengenai laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	RR	TS	STS		
Q.1	12	17	1	0	0	3	131

Item Pertanyaan	Frekuensi Tanggapan					Jumlah	Indeks Skor Aktual
	SS	S	RR	TS	STS		
Q.2	10	18	1	1	0	30	127
Q.3	7	21	2	0	0	30	125
Q.4	10	19	0	1	0	30	128
Q.5	11	14	4	1	0	30	125
Q.6	8	19	1	1	1	30	122
Q.7	10	19	1	0	0	30	129
Q.8	12	17	1	0	0	30	131
Q.9	10	18	2	0	0	30	128
Q.10	10	18	1	1	0	30	127
TOTAL SKOR DICAPAI							1.273

(Sumber : Kuesioner Penelitian)

Untuk memberikan interpretasi terhadap skor yang diperoleh, maka dilakukan pengkategorian dengan cara sebagai berikut:

Indeks skor minimum = bobot tertinggi x jumlah pernyataan x n

$$= 5 \times 10 \times 30$$

$$= 1500$$

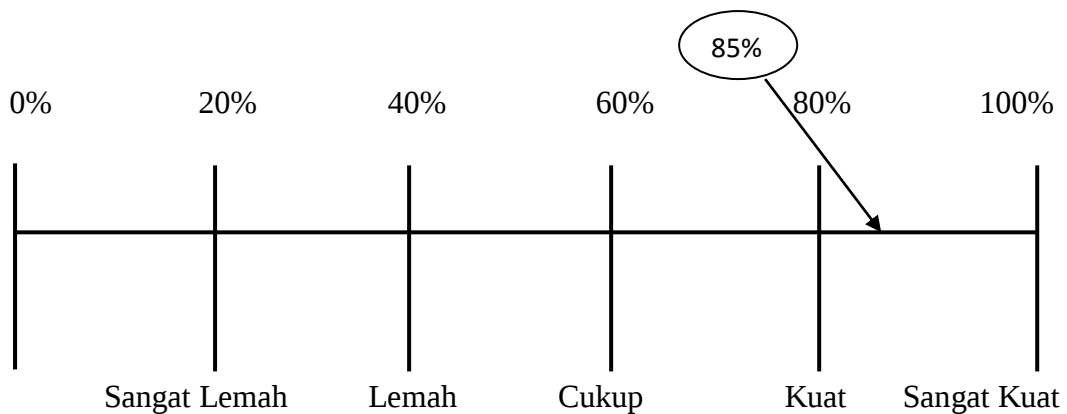
Indeks skor minimum = bobot terendah x jumlah pernyataan x n

$$= 1 \times 10 \times 30$$

$$= 300$$

Presentase skor = $(1273 : 1500) \times 100$

$$= 84,86\% \text{ dibulatkan menjadi } 85\%$$



Gambar 4.8

Garis Kontinum Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan perhitungan di atas, responden memberikan nilai sebesar 1273 dari skor ideal 1.500 (84,68%). Informasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, kualitas laporan keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah baik. Selain itu berdasarkan rekapitulasi jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden terdapat pada indikator Relevan pernyataan “Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Bapak/Ibu bekerja memberikan informasi sebagai alat evaluasi dalam koreksi atas kegiatan dimasalalu untuk penyusunan tahun berikutnya” dengan skor 131 dari 1.273 (10,29 %) dengan rata-rata jawaban didominasi dengan tanggapan sangat setuju dan setuju. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa para pegawai bagian keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan indikator relevan pada laporan keuangan dengan baik. Sedangkan jawaban terendah responden terdapat pada indikator andal dengan pernyataan “Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus” dengan skor 122 dari 1.273 (9,58%). Walaupun rata-rata jawaban responden menunjukkan sangat setuju dan setuju, namun dengan persentase tersebut mengindikasikan bahwa para pegawai

bagian keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dapat membuat laporan yang bersifat andal.

4.2 Hasil Pengujian

4.2.1 Hasil pengujian Validitas

Menurut Ghazali (2016:52) uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini bertujuan untuk menguji sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukuran mampu mengukur apa yang ingin diukur.

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 83 orang responden dengan jumlah pernyataan sebanyak 41 item. Dimana seluruh item pertanyaan dikategorikan valid dengan syarat r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dalam penelitian ini r_{tabel} ditetapkan sebesar 0,2159 (lihat r_{tabel} pada $df=81$ dengan uji dua sisi) berdasarkan tabel r kualitas laporan keuangan dengan rumus $(n-2)$, $(83-2=81)$. Ketentuan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

(i) Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan tersebut valid.

(ii) Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4.11**Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

No. Pernyataan	Indeks Validitas	Titik Kritis	Keterangan
Q.1	0,549	0,361	Valid
Q.2	0,550	0,361	Valid
Q.3	0,577	0,361	Valid
Q.4	0,576	0,361	Valid
Q.5	0,561	0,361	Valid
Q.6	0,529	0,361	Valid
Q.7	0,779	0,361	Valid
Q.8	0,701	0,361	Valid
Q.9	0,517	0,361	Valid
Q.10	0,590	0,361	Valid

(Sumber: Output SPSS Versi 23)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 23 yang tersaji pada tabel 4.11, dapat dilihat bahwa seluruh instrument penelitian yang digunakan memiliki nilai koefisien validitas ($r > 0,361$ (titik kritis) sehingga seluruh instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia dinyatakan valid.

Tabel 4.12**Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah**

No. Pernyataan	Indeks Validitas	Titik Kritis	Keterangan
Q.1	0,488	0,361	Valid
Q.2	0,726	0,361	Valid
Q.3	0,707	0,361	Valid
Q.4	0,504	0,361	Valid
Q.5	0,383	0,361	Valid
Q.6	0,473	0,361	Valid
Q.7	0,689	0,361	Valid
Q.8	0,765	0,361	Valid
Q.9	0,557	0,361	Valid

No. Pernyataan	Indeks Validitas	Titik Kritis	Keterangan
Q.10	0,646	0,361	Valid
Q.11	0,513	0,361	Valid
Q.12	0,631	0,361	Valid
Q.13	0,527	0,361	Valid
Q.14	0,668	0,361	Valid
Q.15	0,622	0,361	Valid
Q.16	0,644	0,361	Valid
Q.17	0,493	0,361	Valid
Q.18	0,802	0,361	Valid
Q.19	0,772	0,361	Valid
Q.20	0,786	0,361	Valid
Q.21	0,603	0,361	Valid

(Sumber: *Output SPSS Versi 23*)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 23 yang tersaji pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan memiliki nilai koefisien validitas ($r > 0,361$ (titik kritis) untuk mengukur variabel pengelolaan barang milik daerah dinyatakan valid.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

No. Pernyataan	Indeks Validitas	Titik Kritis	Keterangan
Q.1	0,463	0,361	Valid
Q.2	0,731	0,361	Valid
Q.3	0,423	0,361	Valid
Q.4	0,782	0,361	Valid
Q.5	0,797	0,361	Valid
Q.6	0,815	0,361	Valid
Q.7	0,662	0,361	Valid
Q.8	0,734	0,361	Valid
Q.9	0,703	0,361	Valid
Q.10	0,875	0,361	Valid

(Sumber: *Output SPSS Versi 23*)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 23 yang tersaji pada tabel 4.13, dapat dilihat bahwa seluruh instrument penelitian yang digunakan memiliki nilai koefisien validitas ($r > 0,361$ (titik kritis) sehingga seluruh instrument penelitian untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan dinyatakan valid.

4.2.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Menurut Sugiono (2017:135) reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan keandalan instrument yang menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan metode *cronbach's alpha*. Instrument dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* pada nilai 0,601 – 0,80 dan dikatakan sangat reliabel jika nilai *cronbach alpha* berada pada nilai 0,801 – 1,00. Dengan menggunakan program SPSS 23, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Dengan menggunakan program SPSS 23, diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,799	10

(Sumber : Pengolahan Data SPSS Ver 23)

Pada tabel 4.14, dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,799 $> 0,601$. Dapat disimpulkan bahwa

penelitian ini dapat diterima atau diandalkan (*reliable*), karena nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran 0,601- 0,80 yaitu 0,779.

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,919	21

(Sumber : Pengolahan Data SPSS Ver 23)

Pada tabel 4.15, dapat dilihat bahwa variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,919 > 0,601$. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diterima atau diandalkan (*reliable*), karena nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran 0,801 - 1,0 yaitu 0,919.

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,887	10

(Sumber : Pengolahan Data SPSS Ver 23)

Pada tabel 4.16, dapat dilihat bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,887 > 0,601$. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diterima atau diandalkan (*reliable*), karena nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran 0,887 - 1,0 yaitu 0,887.

Dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* variabel X_1 (0,799) X_2 (0,919) Y (0,887) maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini dapat diterima dan *reliable*.

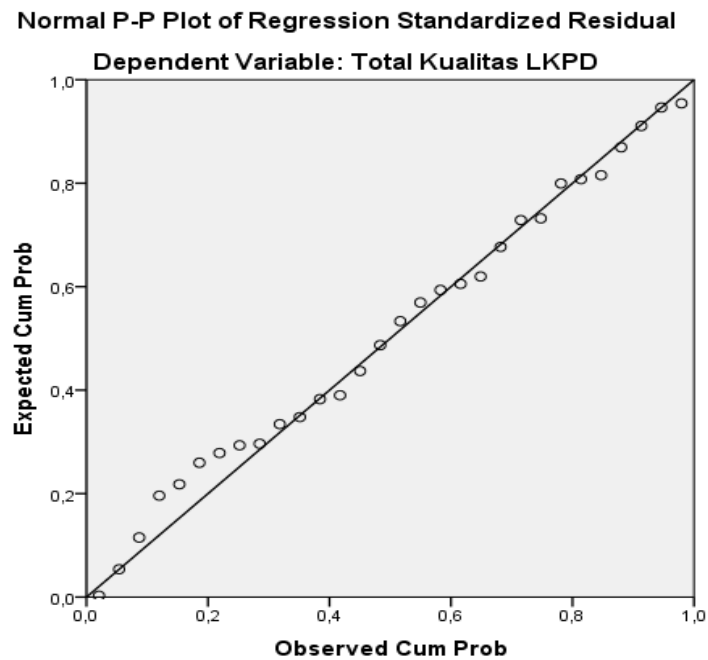
4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat secara *normal probably plot*.

Selain dengan melihat grafik secara histogram ataupun melihat secara *normal probably plot*, salah satu cara melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorof smirnov* digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai signifikan *kolmogorof smirnov* lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan (0,05) maka data terdistribusi secara normal. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot*, grafik histogram dan *kolmogorof smirnov*.

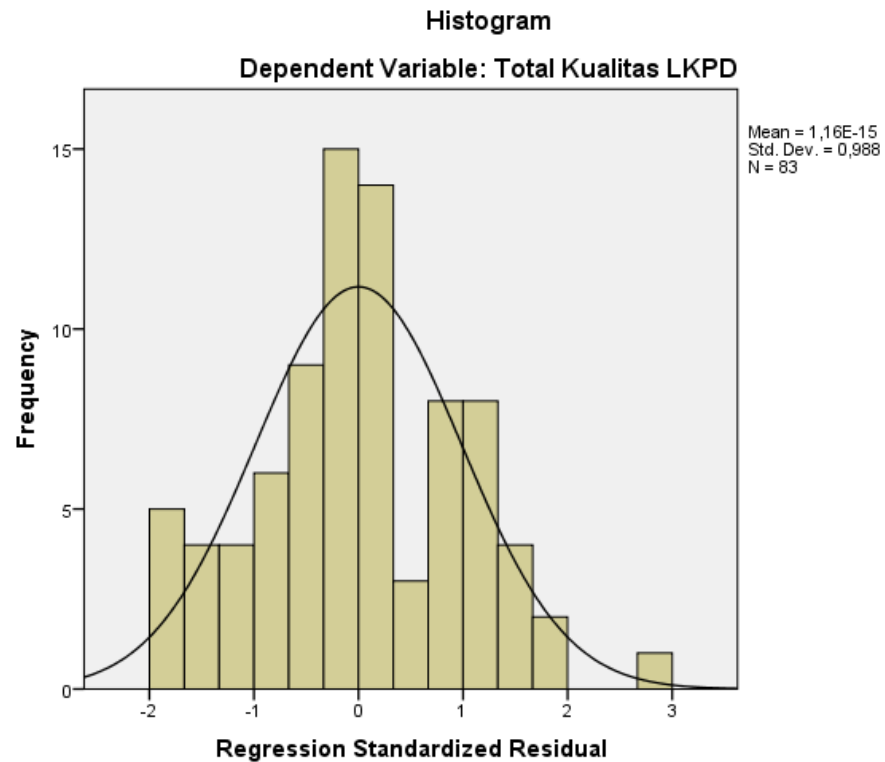


Gambar 4.9

Grafik Norma –Plot

(Sumber :*Output* SPSS versi 23)

Penyebaran distribusi data dapat dilihat dengan menggunakan grafik *P Plot*. Dilihat dari grafik *Probability Plot*, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan menunjukkan garis diagonal yang merupakan potongan antara garis probabilitas harapan dan garis probabilitas pengamatan. Nilai *Probability Plots* terletak disekitas garis diagonal, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data adalah normal.



Gambar 4.10
Histogram Uji Normalitas
(Sumber: *Output SPSS versi 23*)

Gambar menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak melenceng dari kiri maupun ke kanan. Dalam hal ini data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dilakukan dengan uji *kolmogorov smirnov* satu arah. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 = 0$, sampel terdistribusi normal.

$H_1 \neq 0$, sampel terdistribusi tidak normal.

Dasar keputusan normal atau tidaknya keputusan adalah sebagai berikut:

- (i) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

- (ii) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tabel 4.17

Tabel Uji Normalitas *One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,39282187
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber :Output SPSS versi 23)

Dari hasil uji *Kolmogorov Smirnov* di atas diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sign 2-tailed) sebesar 0,200. Karena signifikan lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka nilai residual tersebut telah terdistribusi secara normal.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu model

regresi bebas dari multikolinieritas, maka nilai VIF harus kurang dari 10 dan nilai tolerance harus lebih dari 0,10.

Tabel 4.18
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,070	9,266		-,115	,909		
TOTAL							
Kompetensi	,408	,233	,307	1,748	,092	,658	1,520
SDM							
Total PBMD	,288	,114	,445	2,535	,017	,658	1,520

a. Dependent Variable: Total Kualitas LKPD

(Sumber: OutputSPSS versi 23)

Dari hasil uji multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari kompetensi sumber daya manusia adalah 0,658, pengelolaan barang milik daerah adalah 0,658 serta nilai VIF kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah sebesar 1,520 atau kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah-masalah multikolinieritas kualitas laporan keuangan model regresi.

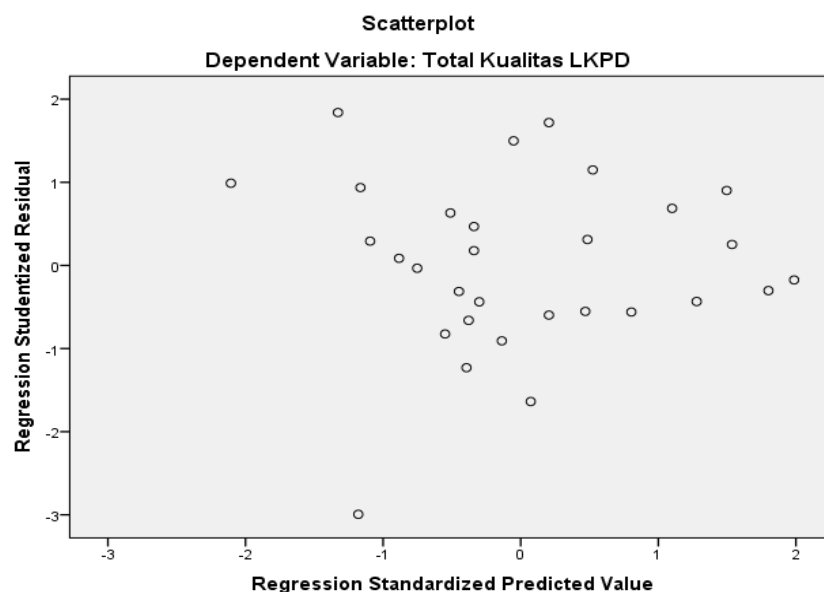
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variens* dari nilai residual dari satu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan jika *variens* berbeda

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, hanya dengan melihat *scatter plot* dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk *scatter plot* yaitu:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar dan di bawah angka 0 kualitas laporan keuangan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.11

Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas

(Sumber: *Output SPSS versi 23*)

Dari *Scatter Plot* tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas atau menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 kualitas laporan keuangan sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam metode regresi linear.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y : kualitas laporan keuangan
- A : *intercept* (konstanta) atau nilai rata-rata Y prediksi jika $X_1=X_2=0$
- a, b_1 , b_2 : Koefisien Regresi
- X_1 : Kompetensi sumber daya manusia
- X_2 : Pengelolaan Barang Milik Daerah
- b_1 : Besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, Jika X_1 naik/turun satu satuan dan X_1 konstan
- b_2 : Besarnya kenaikan/penurunan Y dalam satuan, Jika X_2 naik/turun satu satuan dan X_2 konstan
- + atau - : Tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X_1, X_2
- e : kesalahan (error)/tingkat pengganggu

Dengan menggunakan software SPSS versi 23, diperoleh hasil estimasi regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 4.19

Estimasi regresi linear berganda antara kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,070	9,266		-,115	,909
	TOTAL Kompetensi SDM	,408	,233	,307	1,748	,092
	Total PBMD	,288	,114	,445	2,535	,017

a. Dependent Variable: Total Kualitas LKPD

(Sumber: Output SPSS versi 23)

Tabel *output* di atas memberikan informasi mengenai hasil estimasi regresi linear berganda antara kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan. Pada tabel 4.19, dapat dilihat bahwa nilai konstanta (α) yang diperoleh adalah sebesar -1,070 dengan nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,408 (b_2) sebesar 0,288 dan standar error (e) sebesar 9,266

Persamaan regresi linear yang terbentuk dari hasil estimasi diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,070 + 0,408X_1 + 0,288X_2 + 9,266$$

Pada persamaan regresi linear di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi yang diperoleh bertanda positif, artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan, sebaliknya jika kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah tidak baik, akan mengakibatkan

kualitas laporan keuangan yang tidak baik. Pada persamaan di atas juga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

$a = -1,070$ konstanta sebesar $-1,070$ menunjukkan bahwa jika variabel-variabelindependen (kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan) adalah sebesar $-1,0\%$.

$b_1 = 0,408$ koefisien kompetensi sumber daya manusia (X_1) sebesar $0,408$ yang artinya setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia sebesar 1% maka kualitas laporan keuangan naik sebesar $0,408\%$.

$b_2 = 0,288$ koefisien variabel pengelolaan barang milik daerah (X_2) sebesar $0,288$ yang artinya setiap kenaikan pengelolaan barang milik daerah sebesar 1% , maka kualitas laporan keuangan naik sebesar $0,288\%$.

4.2.5 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan atau derajat asosiasi antara kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan untuk memberikan interpretasi terhadap nilai korelasi yang diperoleh, peneliti mengacu pada pedoman interpretasi koefisien korelasi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.20

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,09-0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0, 60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

Koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.21

Koefisien Korelasi

Correlations

	TOTAL Kompetensi SDM	Total PBMD	Total Kualitas LKPD
TOTAL Kompetensi SDM	1	,585**	,567**
Pearson Correlation			
Sig. (2-tailed)		,001	,001
N	30	30	30
Total PBMD	,585**	1	,625**
Pearson Correlation			
Sig. (2-tailed)	,001		,000
N	30	30	30
Total Kualitas LKPD	,567**	,625**	1
Pearson Correlation			
Sig. (2-tailed)	,001	,000	
N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Output SPSS versi 23)

Berdasarkan hasil tabel 4.21 terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan 0,567

atau 56,7% yang berarti bahwa terdapat hubungan sedang, karena pada interval 0,40-0,599 (dengan kriteria sedang). Selanjutnya hubungan antara pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0,625 yang berarti bahwa terdapat hubungan kuat, karena pada interval 0,60-0,799 (dengan kriteria kuat).

4.2.6 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (r^2) merupakan nilai yang menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk persen.

Dengan menggunakan software SPSS versi 23, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.22
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,672 ^a	,452	,412	3,516

a. Predictors: (Constant), Total PBMD, TOTAL Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Total Kualitas LKPD

(Sumber: Output SPSS versi 23)

Pada tabel 4.22 di atas, dapat dilihat nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,452 atau 45,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 45,2 % terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sebanyak (1-R

square) 0,548 atau 54,8% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diketahui.

4.2.7 Pengujian Hipotesis

4.2.7.1 Pengujian Pengaruh secara Parsial (Uji t)

Uji t dimaksud untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial atau antara variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan.

Kriteria pengujian t:

1. Tolak H_0 dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
2. Tolak H_0 dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

Tabel 4.23

Coefficient Uji T Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,070	9,266		-,115	,909		
TOTAL Kompetensi SDM	,408	,233	,307	1,748	,092	,658	1,520
Total PBMD	,288	,114	,445	2,535	,017	,658	1,520

a. Dependent Variable: Total Kualitas LKPD

(Sumber: *Output SPSS versi 23*)

a. Hasil Penelitian Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

$H_0: \beta = 0$: Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

$H_1: \beta \neq 0$: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pada tabel 4.23, diketahui bahwa *unstandarized coefficient* mempunyai nilai positif sebesar 0,408. Artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa t_{hitung} yang diperoleh untuk variabelkompetensi sumber daya manusia sebesar 1,748. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $\alpha = 0,05$, $df = n-k-1$ maka $df = 30-2-1 = 27$, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,051. Karena t_{hitung} yang diperoleh sebesar 1,748 berada di dalam nilai t_{tabel} (-2,051 dan 2,051) dan hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai sebesar 0,092 maka tidak sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya secara parsial, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Hasil Penelitian Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

$H_0: \beta = 0$: Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

$H_1: \beta \neq 0$: Pengelolaah Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pada tabel 4.23, diketahui bahwa *unstandardized coefficient* mempunyai nilai positif sebesar 0,288. Artinya pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} yang diperoleh untuk variabel pengelolaan barang milik daerah sebesar 2,532. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $\alpha = 0,05$, $df = n - k - 1$ maka $df = 30 - 2 - 1 = 27$, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,051. Karena t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2,535 berada di luar nilai t_{tabel} (-2,051 dan 2,051) dan hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai sebesar 0,017 maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.7.2 Pengujian Pengaruh secara simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0: \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

$H_1: \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Uji hipotesis secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F kualitas laporan keuangan dengan tingkat signifikan 5%. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Bila nilai F lebih besar dari pada 3,09 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai hitung lebih besar dari pada nilai F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 .

Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.24
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275,541	2	137,770	11,143	,000 ^b
	Residual	333,826	27	12,364		
	Total	609,367	29			

a. Dependent Variable: Total Kualitas LKPD

b. Predictors: (Constant), Total PBMD, TOTAL Kompetensi SDM

(Sumber: Output SPSS versi 23)

Pada tabel 4.25 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,143 nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan $\alpha = 0,05$ dan $df_1:2$ dan $df_2:n-k-1$ ($30-2-1$) = 27 maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,35. Karena F_{hitung} (11,143) berada di luar F_{tabel} (-3,35 dan 3,35), dan hasil dari uji statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai

sebesar 0,000 karena F_{hitung} berada di luar F_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 , maka sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak H_a diterima. Artinya kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh hasil “Sangat Kuat”. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) yang didominasi jawaban “setuju” sehingga diperoleh total skor sebesar 1294 dengan prosentase 86,26%, maka diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia dikategorikan “sangat kuat” berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah diterapkan dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 5 indikator yaitu *motives*, *trait*, *self concept*, *knowledge* dan *skills* yang diukur dengan 10 pernyataan.

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan menunjukkan masih adanya responden yang menjawab ragu-ragu pada pernyataan mengenai konsistensi dalam bekerja, inisiatif, dan menghasilkan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu. Masih ada pula responden yang menjawab tidak setuju pada pernyataan mengenai pengetahuan responden dibidang akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Artinya meskipun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam kategori sangat kuat, namun masih menunjukkan adanya kelemahan pada kompetensi sumber daya manusia di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang masih harus ditingkatkan. Indikator yang penerapannya masih rendah terdapat pada indikator *Knowledge* (Pengetahuan) pernyataan “Bapak/Ibu bekerja di bagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi” dengan skor 123 dari 1.294 (9,50%), serta pernyataan “Bapak/Ibu yang memiliki pengetahuan di bidang Akuntansi selama ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat” dengan skor 129 (9,96%). Maka dari itu dengan persentase tersebut menunjukkan bahwa para pegawai bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang belum memiliki pengetahuan dan latar belakang pendidikan Akuntansi.

4.3.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel pengelolaan barang milik daerah diperoleh hasil “sangat kuat”. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel pengelolaan barang milik daerah (X2) yang didominasi jawaban “setuju” sehingga diperoleh total skor sebesar dengan prosentase 85,74%, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan barang milik daerah dikategorikan “sangat kuat” berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti masing-masing responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pengelolaan barang milik daerahnya dengan baik. Pengelolaan barang milik daerah terdiri dari

11 indikator yaitu Perencanaan kebutuhan dan anggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Yang diukur dengan 21 pertanyaan.

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan menunjukkan masih ada responden yang menjawab ragu-ragu pada beberapa pernyataan variabel pengelolaan barang milik daerah seperti pernyataan mengenai Bagian Perencanaan/umum SKPD merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan kondisi barang, proses pengadaan Barang Milik Daerah (BMD), pengurus barang melakukan pencatatan pemeliharaan, pengelola barang melakukan penilaian terhadap BMD, penghapusan BMD, pengelola barang dan pengguna barang melakukan inspeksi, "Uraian tugas dan wewenang pengurus barang dan penyimpan barang disusun secara jelas, dan uraian tugas dan wewenang yang dibuat telah dikomunikasikan dan dipahami.

Artinya meskipun pengelolaan barang milik daerah yang ditunjukkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam kategori sangat kuat, namun masih menunjukkan adanya kelemahan. Jawaban terendah responden diantaranya terdapat pada indikator pemusnahan pernyataan "Proses pemusnahan barang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku" dengan skor 129 (4,77%), indikator pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan pernyataan "Pengurus barang dan penyimpanan barang mengikuti rapat kerja, lokakarya, seminar dan penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah" dengan skor 126

(4,66%), indikator pengamanan dan pemeliharaan pernyataan “Bidang Aset melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik, maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, penyerobotan, dan pengambilalihan atau klaim pihak lain” dengan skor 126 (4,66%). Walaupun rata-rata jawaban responden menunjukkan sangat setuju dan setuju, namun dengan persentase tersebut mengindikasikan bahwa para pegawai bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya menjalankan pengelolaan barang milik daerah dengan baik, maka pengelolaan barang milik daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang masih harus dibenahi.

4.3.3 Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap variabel kualitas laporan keuangan diperoleh hasil “sangat kuat”. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel kualitas laporan keuangan (Y) yang didominasi jawaban “setuju” sehingga diperoleh total skor sebesar 1.273 dengan prosentase 85% maka diperoleh kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan dikategorikan “sangat kuat” berdasarkan garis kontinum. Hal ini berarti laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat telah disajikan dengan baik. Kualitas laporan keuangan terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang diukur dengan 10 pernyataan.

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan menunjukkan masih adanya responden yang menjawab ragu-ragu pada pernyataan mengenai laporan keuangan telah memberikan informasi sebagai alat evaluasi dan koreksi, Instansi menyajikan laporan keuangan secara lengkap, Informasi yang disajikan bebas dari kesalahan yang bersifat material, konsisten instansi dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku, dan laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna dengan sebaik-baiknya.

Responden masih ada yang menjawab tidak setuju pada pernyataan mengenai laporan keuangan selesai tepat waktu, transaksi yang disajikan tergambar dengan jujur, informasi bebas dari kesalahan material, dan informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Dan menjawab sangat tidak setuju pada pernyataan mengenai penyajian informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.

Artinya meskipun kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam kategori sangat kuat, namun masih menunjukkan adanya kelemahan. Jawaban terendah responden terdapat pada indikator andal dengan pernyataan “Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus” dengan skor 122 dari 1.273 (9,58%). Walaupun rata-rata jawaban responden menunjukkan sangat setuju dan setuju, namun dengan persentase tersebut mengindikasikan bahwa para pegawai bagian keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya dapat membuat laporan yang bersifat andal dan masih harus diperbaiki.

4.3.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dan disajikan pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia nilai signifikansi sebesar 0,092 nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,092 > 0,05$). Hipotesis ke 1 yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Maka dengan demikian kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil tabel 4.21, terlihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan 0,567 atau 56,7% yang berarti bahwa terdapat hubungan sedang, karena pada interval 0,40-0,599 (dengan kriteria sedang).

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada SKPD Kabupaten Bandung Barat belum memiliki kompetensi sumber daya manusia belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya responden yang bekerja di bagian keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi masih sangat sedikit, yaitu hanya sebanyak 35 responden dari 83 responden.

Kompetensi sumber daya manusia diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kompetensi sumber daya manusia juga dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Kompetensi sumber daya manusia terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

keandalan laporan keuangan (Rahim, 2015). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat berjalan efektif tentunya diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah yang berkualitas guna menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Siahaya dkk., 2016). Pemerintah harus memberikan pelatihan-pelathan sehingga kualitas yang dimiliki pegawai akan tinggi yang tentunya akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik dan pegawai mampu memberikan yang terbaik (Kiranakanti dan Erawati, 2016).

4.3.5 Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan barang milik daerah nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hipotesis ke 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Maka dengan demikian pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 11 indikator yang terdiri dari 21 pernyataan dengan mendapatkan proporsi sebesar 86%. Selanjutnya hubungan antara pengelolaan barang milik daerah dengan kualitas laporan keuangan sebesar 0,625 yang berarti bahwa terdapat hubungan kuat, karena pada interval 0,60-0,799

(dengan kriteria kuat). Apabila optimalisasi atau pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) ditingkatkan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat (Anshari, 2016).

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelola Barang Milik Negara Daerah, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengatur pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik daerah yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, karena jumlah dan nilai asset yang tersaji di laporan keuangan akan menjadi cerminan kondisi optimal daerah kita (Basirun, 2018). Dalam proses pengelolaan BMD, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan BMD secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa seluruh mekanisme dan prosedur pengelolaan BMD, harus telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Barang Milik Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan hasil pengujian *output* regresi uji F pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa angka signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,005$). Hipotesis ke 3 yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pada tabel

4.22, dapat dilihat nilai *R square* yang diperoleh sebesar 0,452 atau 45,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah memberikan kontribusi pengaruh sebesar 45,2 % terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sebanyak (1-*R square*) 0,548 atau 54,8% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diketahui.

Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki tingkat kompetensi sumber daya manusia yang baik, hal ini ditunjukkan dengan dengan 5 indikator yang terdiri dari 10 pernyataan dengan mendapatkan proporsi sebesar 86%. Sementara untuk pengelolaan barang milik daerah dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa pada SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 11 indikator yang terdiri dari 21 pernyataan dengan mendapatkan proporsi sebesar 86%.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat berjalan efektif tentunya diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah yang berkualitas guna menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Siahaya dkk., 2016). Pemerintah harus memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kualitas yang dimiliki pegawai akan tinggi yang tentunya akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik dan pegawai mampu memberikan yang terbaik (Kiranakanti dan Erawati, 2016). Jadi semakin baik suatu lembaga pemerintah memiliki kompetensi sumber daya manusia dan melaksanakan pengelolaan barang

milik daerah dengan baik, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai sangat baik, menunjukkan bahwa pegawai keuangan di SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah cukup kompeten dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam internal pemerintahan.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan barang milik daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai sangat baik, menunjukkan bahwa SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pengelolaan barang milik daerahnya dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai sangat baik, menunjukkan bahwa SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah membuat laporan keuangan yang berkualitas dalam mendukung penyelesaian tugasnya

3. Secara parsial kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Secara parsial pengelolaan barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

5.2. Saran

Pada bagian akhir ini, peneliti bermaksud mengajukan saran yang berhubungan dengan penelitian . Adapun saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
 1. Berdasarkan tanggapan responden, masih terbatas pegawai yang memiliki latar belakang dibidang Akuntansi. Sebaiknya, proses perekrutan calon pegawai sesuai standar kompetensi di bagian keuangan, maka dapat diperoleh calon pegawai yang semakin kompeten dalam membuat laporan keuangan.
 2. Berdasarkan tanggapan responden, masih terdapat kelemahan dalam pemusnahan barang milik daerah yang belum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebaiknya para pegawai diberikan pemahaman bahwa prosedur pengelolaan barang milik daerah termasuk prosedur pemusnahan barang terikat dengan aturan yang

harus dipatuhi, agar tidak terjadi kesalahpahaman penatausahaan atas barang milik daerah tersebut.

3. Berdasarkan tanggapan responden, masih terdapat kelemahan mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, maka perlu diadakannya evaluasi pengamanan dan pemeliharaan barang secara rutin yang didukung oleh petugas pengawas internal instansi tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan barang milik daerah.

2. Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain seperti pendidikan dan pelatihan SDM, peran teknologi informasi, struktur organisasi, peran internal audit, dan memperluas cakupan sampel penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih bervariasi dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, E.S. (2016), Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal: Riset Manajemen Bisnis dan Publik Universitas Negeri Padang*, Vol.4, No.1, hlm. 1-18. ISSN: 2337-5345.

Busro, M. (2018), *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi pertama. Jakarta : Prenada Media.

Chen, F. (2011), *Competence for success: Maksimalkan Potensi Diri Menjadi Profesional Berkompeten Karakter & Motivasi*, Jakarta : Gramedia.

Fahmi, I. (2014), *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung : Alfabeta.

Faud, M.R. (2015), *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<http://bppd.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2013/12/pokok-pokok-pengelolaan-bmd.pdf>, diunduh pada tanggal 8 April 2010.

<https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/15698-kaltara-urutan-21-aspek-daya-saing-daerah.html>, diunduh tanggal 25 Desember 2018.

<http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057>, diunduh pada tanggal 1 Januari 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diunduh pada tanggal 5 April 2019.

<https://pontianak.tribunnews.com/2018/12/06/serius-tanggani-aset-daerah-pemda-landak-gelar-bimtek-pengelolaan-barang-milik-daerah>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2018.

<https://kaltimprov.go.id/berita/rakor-revaluasi-bmn-2018-meiliana-pengelolaan-bmd-belum-maksimal>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2018.

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6657/Bab%202.pdf?>, diunduh tanggal 25 Maret 2018.

<http://repository.unib.ac.id/id/eprint/8205>, diunduh pada tanggal 3 September 2014.

Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Idris, A. (2016), *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama. Yogyakarta : Deepublish.

Karsana, I.Y. dan Suarnaya, I.G.N.A. (2017), Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.1., ISSN: 2302-8556. hlm.643-670.

Kirana, I.A. dan Erawati N.M. (2016), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemahaman Basis Akrua, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.2, hlm.1290-1318.

Larasati, S. (2018), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi pertama. Yogyakarta : Deepublish.

Mardiasmo. (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Pangaribuan, O.E. dan Sumini. (2010), *Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta : Kemenkeu RI.

Peraturan Menteri No.16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No. 101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Poae, dkk.(2016), Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Taulan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi*, Vol.8, No.1, hlm, 159-169.

Pujianira, P. (2017), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal nominal Universitas Negeri Yogyakarta* volume vi, Nomor 2, hlm. 14-28.

Rahayu, L., Kennedy, dan Anisma, Y. (2014), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Pada SKPD Provinsi Riau). *E-Journal JOM FEKON*, Vol.1, No.2, hlm. 1-15.

Riduan.dan Kuncoro.(2014), *Cara Menggunakan dan Memakai PathAnalysis (Analisis Jalur)*. Cetakan ke-6. Bandung:Alfabeta.

Robbins, S.P. dan Judge, T.A. (2008), *Perilaku Organisasi*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.

Saleh,C., Islamy, M.I., Zauhar,S., dan Supriyono,B. (2013), *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*, Edisi Pertama, Malang : UB Press.

Siahaya, E., Asnawi, M., dan Layuk, P.K.A. (2016), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol.3, No.1, hlm 1-16.

Simanjuntak. (2013), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Edisi pertama, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudaryo,Y., Ariwibowo, A. dan Sofianti, N.A. (2018), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung, dan Lingkungan Kerja Fisik*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Andi.

Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Triwahyuni, M. (2016), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol.3, No.1, hlm. 2312-2326.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wirawan.(2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Psikologi, Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian: Aplikasi dalam Organisasi Bisnis, Pemerintahan dan Pendidikan*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali Pers.

www.pikiran-rakyat.com, diunduh pada tanggal 5 Juni 2017.

www.news.detik.com, diunduh pada tanggal 30 Mei 2018.

Yadiati, W. (2017), *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media Grup.